

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2015 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan bagian dari siklus Sistem AKIP.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2011- 2021, menetapkan 16 sasaran dengan 20 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja keseluruhan 95,84% dengan interpretasi ***“Memuaskan”***. Kesemuanya diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Sedangkan pelaksana program dan kegiatan tersebut adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Balikpapan. Keberhasilan tersebut adalah berkat dukungan dan hasil kerja seluruh jajaran instansi Pemerintah Kota Balikpapan dalam melaksanakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara konsisten dan akuntabel.

Pengukuran keberhasilan atau kegagalan dalam capaian setiap sasaran Pembangunan di Kota Balikpapan Tahun 2015 dengan alat ukur Indikator Kinerja adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Mutu pendidikan diukur melalui 2(dua) Indikator Kinerja dengan Realisasi kinerja kategori Sangat Baik.
2. Sasaran Meningkatnya Lapangan Usaha dan lapangan Kerja diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja dengan Realisasi kinerja kategori Sangat Baik.
3. Sasaran Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja dengan Realisasi kinerja kategori Sangat Baik.

4. Sasaran Mewujudkan kondusifitas di daerah dengan mensinergikan peran2 masyarakat dan pemerintahan dalam pembangunan diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja dengan Realisasi kinerja kategori Sangat Baik.
5. Sasaran Meningkatnya Meningkatnya pertanian dalam arti luas diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja dengan Realisasi kinerja kategori Sangat Baik.
6. Sasaran Menurunnya tingkat kemiskinan diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja dengan Realisasi kinerja kategori Sangat Baik.
7. Sasaran Meningkatnya kekuatan perekonomian pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja dengan Realisasi kinerja kategori Sangat Baik.
8. Sasaran Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap penyandang masalah Kesejahteraan Sosial diukur melalui 1 (satu) indikator Kinerja dengan Realisasi kinerja kategori Sangat baik.
9. Sasaran Meningkatnya kapasitas penyelenggara pelayanan public diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja dengan Realisasi kinerja kategori Sangat Baik.
10. Sasaran Meningkatnya Cakupan pelayanan persediaan daya listrik kepada masyarakat diukur melalui 1 (satu) indikator Kinerja dengan Realisasi kinerja kategori Sangat baik,
11. Sasaran Berkembangnya kawasan industry dan perdagangan yang berwawasan lingkungan diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja dengan Realisasi kinerja kategori Sangat Baik.
12. Sasaran Terlaksananya Reformasi Birokrasi diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja dengan Realisasi kinerja kategori Sangat Baik.
13. Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja dengan Realisasi kinerja: Indikator pertama, “Nilai AKIP” belum tercapai, dan indikator kedua ‘Nilai LPPD” telah tercapai dengan realisasi kinerja kategori sangat baik.
14. Sasaran Terwujudnya infrastruktur dasar diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja dengan Realisasi kinerja kategori Sangat Baik.

15. Sasaran Meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga dan pembangunan diukur melalui 1 (satu) indikator Kinerja dengan Realisasi kinerja kategori Sangat baik
16. Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup diukur melalui 1(satu) Indikator Kinerja dengan Realisasi kinerja kategori Sangat Baik.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya , sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Balikpapan telah disusun, sebagai bentuk informasi pertanggung jawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan selama tahun 2015.

LKJIP Pemerintah Kota Balikpapan disusun dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja tahunan. Penyusunan LKJIP selain sebagai media informasi pertanggungjawaban, juga merupakan bentuk konsistensi dan komitmen Pemerintah Kota Balikpapan untuk menciptakan transparansi dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik

LKJIP Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2015 menyajikan informasi tentang pelaksanaan kebijakan dan program, pencapaian sasaran dalam upaya mewujudkan tercapainya tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan periode tahun 2011 – 2016 yaitu : ***“MEWUJUDKAN KOTA BALIKPAPAN NYAMAN DIHUNI MENUJU MADINATUL IMAN”***

Pencapaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan ini, tentunya merupakan hasil kerja keras, kerjasama dari semua komponen masyarakat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, mulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kota Balikpapan kami ucapkan terimakasih.

WALIKOTA BALIKPAPAN

H.M. RIZAL EFFENDI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. LANDASAN UMUM.....	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
D. DATA ORGANISASI.....	7
E. SISTEMATIKA PENULISAN	12
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
A. GAMBARAN UMUM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN.....	14
1. VISI DAN MISI	15
2. TUJUAN DAN SASARAN	19
3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	28
B. PENETAPAN KINERJA	44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA	65
B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN	187
BAB IV PENUTUP	201

BAB I

PENDAHULUAN

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) tahun 2015 merupakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun keempat dalam masa RPJMD Tahun 2011-2016. LKjIP Tahun 2015 disusun berdasarkan RKPD Tahun 2015 yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016, sedangkan target kinerjanya diukur berdasarkan RPJMD Tahun 2011-2016. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang diemban sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Balikpapan Tahun 2015.

A. LANDASAN HUKUM

Penyusunan LKjIP Kota Balikpapan Tahun 2015 ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
6. Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 No 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2010–2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan;
16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan RPJMD dengan RPJM Nasional 2010-2014;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja tahunan;
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 No.15);
23. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 No.4);
24. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Balikpapan Tahun 2015 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan Kota Balikpapan selama tahun 2015 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

Melalui penyajian mengenai gambaran dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang komprehensif, terkait pula dengan fungsi LKJIP yang strategis bagi perkembangan kapasitas dan kapabilitas instansi, penyusunan LKJIP ini berperan dan bertujuan sebagai media akuntabilitas instansi yang dapat menjadi acuan baku dan analisis lanjutan yang mengarah pada sinergitas, sinkronisasi dan integritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 dalam agenda mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

LKjIP Kota Balikpapan Tahun 2015 ini juga berorientasi untuk sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting guna perbaikan kinerja pada masa berikut dalam rangka mewujudkan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

C. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis, Batas Administrasi Daerah, Luas Wilayah, Dan Topografis

Secara administratif luas keseluruhan Kota Balikpapan menurut RTRW Tahun 2012-2032 adalah 81.495Ha, yang terdiri dari luas daratan 50.330,57 Ha dan luas lautan 31.164,03 Ha. Secara geografis Kota Balikpapan terletak pada posisi 116,5° Bujur Timur dan 117,0° Bujur Timur serta diantara 1,0° Lintang Selatan dan 1,5° Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 Kota Balikpapan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan 7 Kelurahan dalam wilayah Kota Balikpapan dan Perda Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan, secara administratif wilayah Kota Balikpapan terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) Kelurahan.

Secara umum Kota Balikpapan berada pada ketinggian 0 sampai > 100 meter di atas permukaan laut. Namun dari ketinggian tersebut, terbesar berada pada ketinggian 20-100 mdpl; seluas 20.090,57 ha atau 51,66% dari luas wilayah total Kota Balikpapan. Sedangkan yang berketinggian 10-20 mdpl.; seluas 17.260 ha atau 34,17% dari luas wilayah. Sedangkan yang berketinggian 0-10 mdpl.; seluas 6.980 Ha atau 13% dari luas wilayah.

Secara morfologis Kota Balikpapan terdiri dari kawasan perbukitan yang bergelombang +/- 85% dengan jenis tanah podsolik merah kuning. Sifat jenis tanah ini berlapisan topsoil tipis, struktur tanahnya mudah tererosi. Sedangkan +/- 15% merupakan daerah dataran yang terletak di sepanjang pantai timur dan selatan wilayah Kota Balikpapan. Jenis tanah wilayah ini umumnya adalah alluvial.

Dari sisi topografis sebagian besar wilayah Kota Balikpapan merupakan kawasan perbukitan yang mempunyai kelerengan antara 15-40%, seluas 21.305,57 Ha atau 42,33% dari luas wilayah keseluruhan.

Iklim di Kota Balikpapan termasuk beriklim tropis, mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah yang ada di Kalimantan Timur pada umumnya, yaitu tidak adanya perbedaan antara musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada Bulan Mei sampai Bulan Oktober, sedang musim penghujan terjadi pada Bulan Nopember sampai dengan Bulan April. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan (pancaroba) pada bulan-bulan tertentu. Seiaian itu, karena letaknya di daerah katulistiwa maka iklim di Kalimantan Timur juga dipengaruhi oleh angin Muson, yaitu angin Muson barat Nopember - April dan Angin Muson Timur Mei - Oktober.

Secara umum Kota Balikpapan beriklim panas dengan suhu udara sepanjang tahun berkisar dari 21,7°C sampai 34,7°C. Selain itu, sebagai daerah beriklim tropis, Kota Balikpapan mempunyai kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata berkisar antara 82-91%.

Kota Balikpapan memiliki potensi sumber daya alam yang telah ditetapkan dan dapat dilakukan budidaya maupun non budidaya. Budidaya yang dapat dilakukan antara lain pada kawasan wilayah perkotaan dan sebagian kecil adalah wilayah pinggiran dengan kendala limitasi pengelolaan wilayah, kawasan lainnya adalah potensi sumber daya laut dan pantai sesuai dengan kewenangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu sepanjang 4 (empat) mil dari garis pantai. Saat ini kawasan tersebut telah dilakukan kegiatan pembangunan oleh pemerintah dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan ruang hidup bagi masyarakat sesuai dengan peruntukan wilayah yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kawasan wilayah perkotaan saat ini sangat dirasakan mengalami tekanan yang berat terhadap daya dukung lingkungan sehubungan dengan tingginya aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga menimbulkan dampak banjir dan rawan terjadinya tanah longsor. Sedangkan pada kawasan pantai sebagian telah dilakukan penguasaan dan okupasi oleh masyarakat, bilamana tidak dilakukan pengaturan dapat menimbulkan kerusakan pada ekosistem pantai.

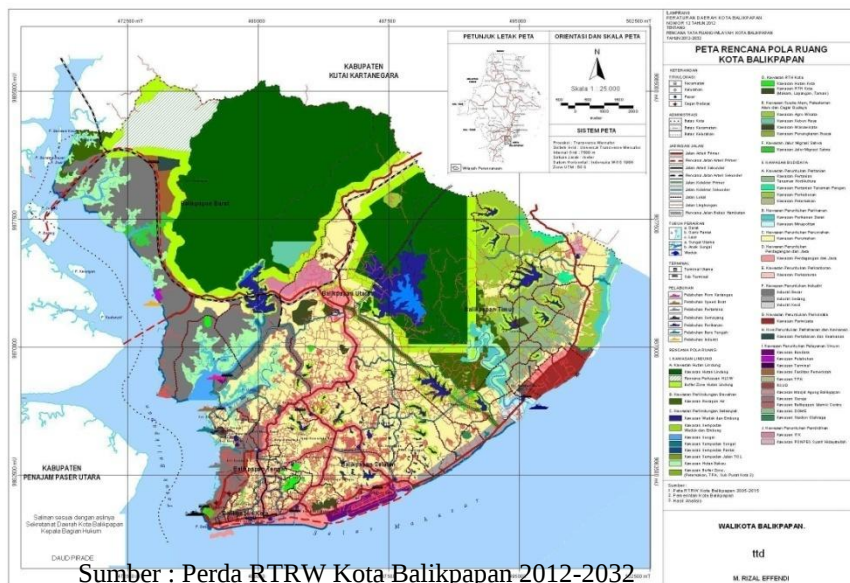
Gambaran mengenai luas lahan menurut jenis penggunaan (kawasan budaya dan kawasan non budidaya) dapat disampaikan sebagai berikut :

- Kawasan Komersial dengan luas 1.054,36 Ha yang terdiri dari Kawasan Perdagangan dan Jasa serta Kawasan Industri.
- Kawasan Perumahan dan Permukiman dengan luas 3.147,32 Ha.

- Kawasan Wisata dengan luas 34,95 Ha.
- Kawasan Militer dengan luas 120,33 Ha.
- Kawasan Khusus dengan luas 5.156,02 Ha.
- Kawasan Lindung dengan luas 15.175,45 Ha.
- Kawasan Pertanian, Perkebunan dan Perikanan dengan luas 6.460 Ha.
- Kawasan Campuran dengan luas 31.148,43 Ha.

Gambar 1.1

Peta Kota Balikpapan Berdasarkan RTRW 2012-2032



2. Gambaran Umum Demografis

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Pertumbuhan penduduk yang makin cepat, mendorong pertumbuhan aspek-aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Perkembangan pendudukan di Kota Balikpapan selama ini menunjukkan peningkatan, dapat dilihat dari jumlah penduduk pada tahun 2011 sebanyak 639.036 jiwa mengalami penurunan menjadi sebanyak 635.199 jiwa pada tahun 2012 dan meningkat secara signifikan pada tahun 2013 menjadi 668.070. Pada tahun 2014 jumlah penduduk mengalami peningkatan menjadi 706.414 jiwa, sehingga Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Balikpapan pada tahun 2014 adalah 5,74 %.

Peningkatan pertumbuhan penduduk ini dikarenakan adanya pemberlakuan elektronik KTP sehingga penduduk pendatang yang sudah membawa surat pindah dari

daerah asal langsung dapat didaftarkan sebagai penduduk Kota Balikpapan. Selain itu angka kelahiran juga mengalami peningkatan yang signifikan. Penduduk Kota Balikpapan mendiami wilayah seluas 503,3 km² sehingga rata-rata kepadatan penduduk pada tahun 2014 adalah 1.403,6 jiwa per km². Adapun rincian jumlah dan komposisi penduduk Kota Balikpapan dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Balikpapan
Tahun 2014

Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan/Km2
Balikpapan Selatan	33,93	145.915	43
Balikpapan Kota	14,02	99.905	71,26
Balikpapan Barat	179,95	104.305	5,79
Balikpapan Timur	132,16	81.580	6,17
Balikpapan Tengah	11,07	119.801	108,22
Balikpapan Utara	132,17	154.908	11,72
Jumlah	503,3	706.414	1140,35

Sumber: Disdukcapil Balikpapan

Penduduk Kota Balikpapan berdasarkan struktur usia dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Penduduk Kota Balikpapan Menurut Kelompok Umur (Tanpa WNA)

Kelompok Umur	Tahun						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
0 – 4	38.213	40.283	42.252	44.794	35.224	48.221	99.589
5 – 9	53.920	55.468	54.520	56.657	57.588	60.751	64.021
10 – 14	52.445	53.640	53.272	54.923	56.493	58.779	61.338
15 – 19	46.140	47.421	48.177	50.551	52.003	54.397	56.785
20 – 24	56.410	55.870	54.138	54.529	53.637	55.803	58.613
25 – 29	72.724	72.416	68.530	69.030	65.324	64.647	65.392
30 – 34	69.466	72.166	69.763	71.954	71.948	72.937	74.942
35 – 39	58.346	60.291	58.724	62.548	62.482	64.157	68.007
40 – 44	45.592	48.387	47.225	49.609	51.933	53.389	55.991
45 – 49	36.916	38.477	38.543	40.722	40.419	42.223	45.103
50 – 54	28.269	29.607	31.007	31.387	33.016	33.943	35.582
55 – 59	18.666	21.202	21.211	23.253	23.867	25.302	26.613
60 – 64	9.702	11.043	11.845	12.878	14.681	15.975	17.947
65 +	14.583	15.591	15.364	16.196	16.584	17.546	19.335
Jumlah	601.392	621.862	614.571	639.031	635.199	668.070	704.371

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan

3. Kondisi Ekonomi Kota Balikpapan

a. Potensi Unggulan Daerah

Potensi-potensi yang ada dalam suatu wilayah dapat dilihat dari berbagai macam perspektif dan pendekatan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui potensi unggulan suatu daerah adalah komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Salah satu pendekatan dalam menghitung PDRB adalah menggunakan pendekatan produksi yang merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) dan setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula.

Nilai dan kontribusi sektoral (lapangan usaha) PDRB Kota Balikpapan tahun 2013-2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3
Kontribusi PDRB Kota Balikpapan Tahun 2013-2014

Lapangan Usaha	Atas dasar harga konstan		Atas dasar harga berlaku	
	(juta Rp)		(juta Rp)	
	2013	2014**	2013	2014**
Pertanian	492.535,20	494,200,90	802.616,67	834,188,46
Pertambangan dan Penggalian	7.895,53	8,273,97	35.593,39	39,256,08
Industri Pengolahan	316.769,40	322,328,69	612.778,54	661,042,06

Listrik , Gas, dan Air Bersih	208.202,59	229,171,73	521.099,23	577,452,90
Bangunan	4.356.023,98	4,750,832,66	10.961.496,08	12,054,516,00
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	5.003.775,67	5,251,453,85	8.302.663,84	8,911,410,27
Pengangkutan dan Komunikasi	2.737.994,93	2,923,381,38	4.155.198,64	4,622,759,84
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	573.404,42	602,961,10	2.026.001,35	2,189,185,80
Jasa-jasa	529.576,43	547,560,52	1.663.837,60	1,751,496,35
TOTAL	14.226.178,16	15,130,164,80	29.081.285,34	31,641,307,76

Sumber: BPS Kota Balikpapan

**) Angka sementara

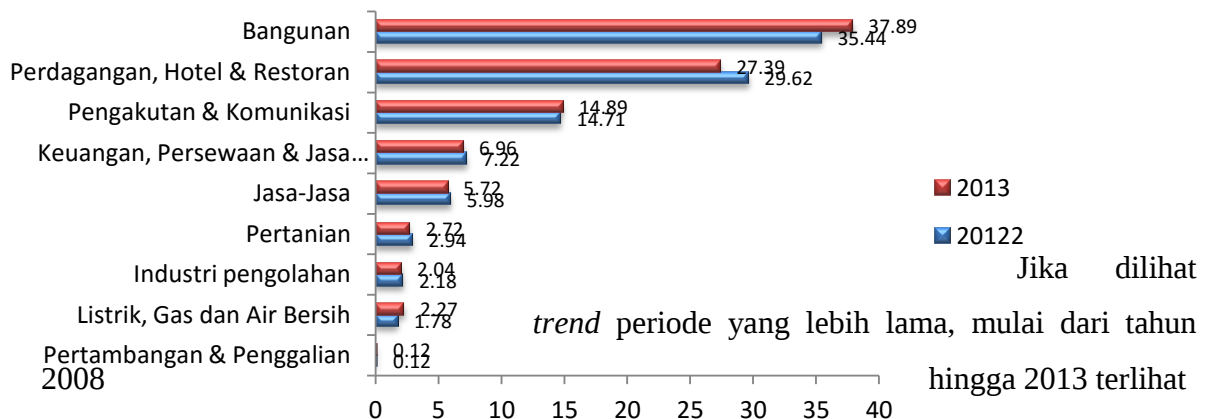
Di antara sektor–sektor pembentuk PDRB di Kota Balikpapan, bahwa kontribusi sektor Bangunan dan sektor Perdagangan, Hotel dan restoran memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan, perkembangan kedua sektor tersebut menunjukkan bahwa kota Balikpapan sedang giat membangun yang mengindikasikan meningkatnya pertumbuhan perekonomian di Balikpapan dengan kata lain semakin menggeliatnya perkembangan perekonomian kota .

Dari tabel tersebut dapat dilihat kontribusi dari PDRB Atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 bahwa kontribusi sektor bangunan memberikan kontribusi paling besar yaitu sebesar 37,69 %, salah satu sumbangan kontribusi bangunan mengalami peningkatan dari tahun 2012 adalah pelaksanaan pembangunan bandara internasional sepinggan dan menggeliat pembangunan perumahan di kota Balikpapan.

Kontribusi sektor terbesar kedua pada tahun 2013 berdasarkan harga berlaku adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan salah satu sektor unggulan Kota Balikpapan. Kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kota Balikpapan pada tahun 2013, sebesar 28,55 % terhadap perekonomian Kota Balikpapan dan mengalami sedikit penurunan kontribusi dibanding tahun 2012 yang sebesar 29,62%. Sedangkan, kontribusi sektor terbesar ketiga disumbangkan oleh sektor pengangkutan dan komunikasi dimana pada tahun 2013 mencapai 14,29%.

Grafik berikut menggambarkan kontribusi sektoral PDRB di Kota Balikpapan selama periode 2012-2013 yang diurut mulai dari nilai kontribusi terbesar (sektor Bangunan) hingga nilai kontribusi terkecil (sektor Pertambangan dan Penggalian) dengan menggunakan harga berlaku.

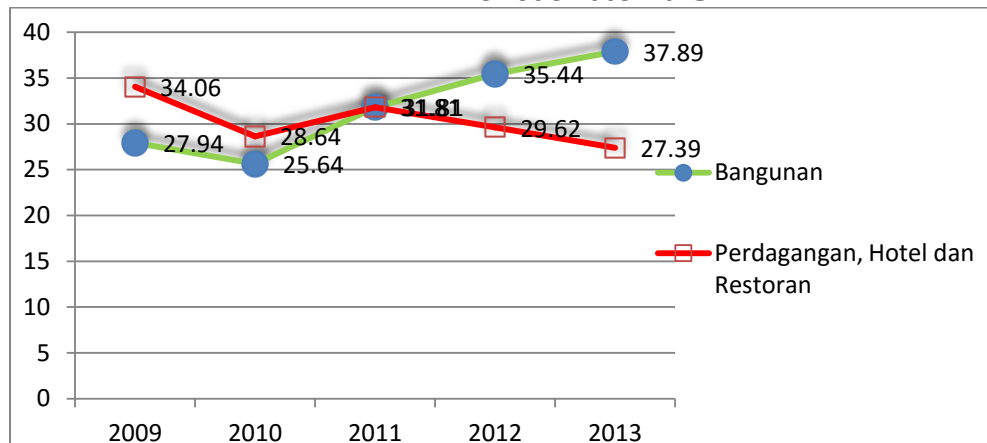
Grafik
Kontribusi Sektoral PDRB Kota Balikpapan Periode 2012-2013 (Harga Berlaku)



bahwa kontribusi sektor Bangunan dan sektor Perdagangan, Hotel dan restoran memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan, perkembangan kedua sektor tersebut menunjukkan bahwa kota Balikpapan sedang giat membangun yang mengindikasikan meningkatnya pertumbuhan perekonomian di Balikpapan dengan kata lain semakin menggeliatnya perkembangan perekonomian kota.

Namun jika dilihat perkembangan terakhir di tahun 2008-2013 yang menunjukkan bahwa kontribusi sektor bangunan mengalami peningkatan dan sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran mengalami peningkatan nilai produk domestik regional bruto dengan pertumbuhan yang mengalami perlambatan, diharapkan sektor ini di masa depan dapat memberikan sumbangsih yang lebih tinggi lagi terhadap perekonomian Kota Balikpapan, hal ini diharapkan sesuai dengan visi Rencana jangka Panjang Kota Balikpapan.

Grafik
Trend Kontribusi Sektor Bangunan dan Perdagangan, Hotel, dan Restoran
Periode 2009-2013



Dinamika perekonomian yang berkembang saat ini di Kota Balikpapan ialah ekonomi yang berfokus pada perdagangan, jasa dan industri dengan mengandalkan keahlian, bakat, dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual adalah harapan bagi ekonomi nasional ataupun daerah untuk bangkit, bersaing, dan meraih keunggulan dalam ekonomi global. Berkembangnya industri di Kota Balikpapan tidak lepas dari sporting dan keberadaan pendukung untuk industri berbasis mining, dan menjadikan salah satu faktor yang memperkuat sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta jasa dan sektor industri pengolahan (tertentu) sebagai potensi unggulan daerah di Kota Balikpapan.

Sektor pariwisata juga merupakan andalan sektor jasa Kota Balikpapan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian, membangkitkan kunjungan wisatawan, membangkitkan pertumbuhan sektor pembangunan lainnya, serta menghidupkan kembali seni dan budaya tradisional Balikpapan. Balikpapan sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur merupakan potensi daya tarik wisata yang tinggi. Dalam lingkup nasional, Kota Balikpapan ditetapkan sebagai kota MICE.

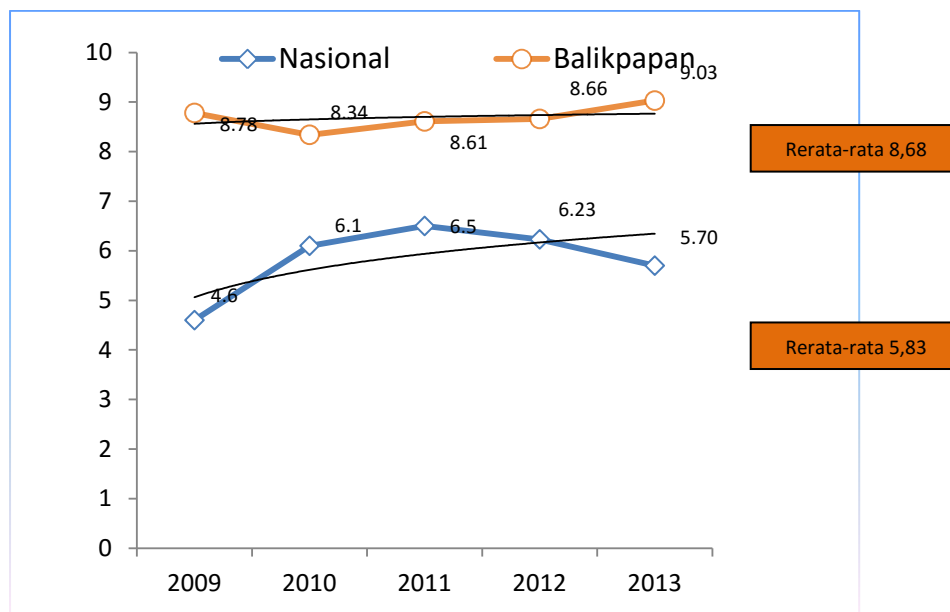
b. Pertumbuhan Ekonomi

Kualitas perkembangan pembangunan suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dengan tingkat pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Walaupun begitu, pertumbuhan ekonomi bukanlah merupakan tujuan akhir dari pembangunan. Tujuan

utama yang ingin dicapai dalam pembangunan adalah kesejahteraan rakyat seluas-luasnya.

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) di Kota Balikpapan selama 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2009–2013) menunjukkan peningkatan yang positif, namun terjadi penurunan pada tahun 2013. Jika pada tahun 2009 LPE Kota Balikpapan mencapai 8,78%, pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 7,06%.

Grafik Error! No text of specified style in document..1
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Balikpapan
Tahun 2009–2013 dan Perbandingannya dengan Tingkat Nasional (%)



Ket: LPE Kota Balikpapan 2009-2013 (Sumber: BPS Kota Balikpapan data diolah).
 LPE tahun 2013 merupakan angka proyeksi
 LPE Nasional 2003-2013 (Sumber BPS Pusat 2013).

Tingkat LPE Kota Balikpapan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan kinerja LPE secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi secara nasional. Selama periode 2009-2013, rerata LPE Kota Balikpapan mencapai 8,86%, sedangkan rata-rata LPE nasional secara periode 2009-2013 hanya berada di kisaran 5,79%.

Selain pertumbuhan ekonomi, perkembangan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Kota Balikpapan juga perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas lagi (multidimensional). Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan tidak berdiri sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas, melainkan saling bertautan (berkorelasi) dengan aspek dan indikator (makro) lainnya. Hal ini berguna untuk dapat

melihat kerangka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dan holistik.

Tabel berikut menguraikan beberapa indikator makro strategis Kota Balikpapan untuk dapat melihat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat secara lebih luas.

Indikator Makro Kota Balikpapan

No	Uraian	Satuan	Tahun					2014**
			2009	2010	2011	2012	2013	
	IPM		77,86	78,33	78,83	79,38	79,45	-
	Angka Harapan Hidup (AHH-o)	Tahun	71,95	72,61	72,39	72,61	72,65	-
	Angka Melek Hurup (AMH)	%	98,37	98,76	98,76	98,86	99,03	-
	Paritas Daya Beli	(Ribu Rp.)	651,650	654,780	657,930	661,330	662,540	-
	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,05	10,08	10,28	10,46	10,54	-
	LPE (Konstan)	Persen	8,78	8,34	8,61	8,66	7,06%	8,81%
	PDRB (Berlaku)	(Juta Rp.)	17.467.6 21,67	19.997.4 14,64	22.882.8 79,62	26.399.9 47,62	29.081.2 85,34	31.641,3 07,76
	PDRB (Konstan)	(Juta Rp.)	10.390.2 39,95	11.256.7 98,09	12.225.7 20,59	13.284.0 49,89	14.226.1 78,16	15.130,1 64,80
	Inflasi	Persen	3,67	7,38	6,45	6,41	8,56	7,22
	Pengangguran (mencari kerja)	Jiwa	15.079	16.152	16.485	24.963	25.666	-

Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2013 data diolah Ket : **) Angka Proyeksi

Berdasarkan data yang diuraikan pada tabel tersebut, secara umum indikator makro ekonomi Kota Balikpapan periode 2009-2014 menunjukkan peningkatan dan pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini dapat menjadi salah satu indikasi bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Adapun penjelasan singkat data-data pada tabel tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Balikpapan yang dapat menunjukkan tingkat pembangunan manusia melalui pengukuran keadaan penduduk menurut usia hidup, pengetahuan, dan hidup layak menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Jika pada tahun 2011 IPM Kota Balikpapan sebesar 78,85 maka pada tahun 2013 mengalami

peningkatan menjadi 79,45. Peningkatan ini tidak terlepas dari hasil kerja keras para unsur pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat. Kinerja pembangunan manusia dalam dimensi ekonomi, pendidikan, dan sosial yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini dapat menjadi indikasi bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan.

Ukuran yang umum dipakai untuk mengetahui status kemajuan pembangunan manusia adalah indeks pembangunan manusia, indeks ini adalah indeks komposit yang dihitung dari 3 (tiga) komponen pilihan dasar yaitu (1) hidup sehat dan umur panjang yang diwakili oleh angka harapan hidup waktu lahir (2) Pendidikan yang diwakili oleh rata-rata tertimbang antara angka melek huruf penduduk usia dewasa dengan rata-rata pencapaian tingkat pendidikan (rata-rata lama sekolah), dan (3) standar kehidupan layak yang diwakili oleh PDRB perkapita dan paritas daya beli perkapita.

Situasi pembangunan manusia dimana bidang pendidikan yang diwakili dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah berdasarkan tabel diatas mengalami peningkatan. Indeks pendidikan Kota Balikpapan Salah satu penyebab adanya peningkatan di bidang pendidikan ialah semakin besarnya proporsi anggaran pendidikan, dan adanya kebijakan dan program pengurangan beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di Kota Balikpapan yang serta peningkatan aspek kualitas sumber daya manusia. Untuk mendukung hal tersebut Pemerintah Kota Balikpapan meningkatkan sarana prasarana dalam hal pendidikan, dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi yang terpenting disertai meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Peningkatan yang serupa juga terjadi di bidang kesehatan. Jika pada tahun 2009 nilai indeks ini berada pada nilai 78,25, pada tahun 2012 meningkat menjadi 79,35 dan pada tahun 2013 menjadi 79,68. Peningkatan ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kota Balikpapan mengalami perbaikan setiap tahunnya. Indeks ekonomi (paritas daya beli) juga mengalami peningkatan selama periode 2009-2013, dimana pada tahun 2009 sudah berada di kisaran Rp. 651.650 dan tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 665.610.

Jika dilakukan komparasi dengan tingkat nasional dan provinsi Kalimantan Timur, perkembangan IPM Kota Balikpapan relatif lebih baik. Pada tingkat nasional, IPM pada tahun 2011 hanya mencapai nilai 71,77 dan meningkat pada tahun 2013 menjadi 73,81.

Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2009, IPM Provinsi Kalimantan Timur baru mencapai nilai 75,11 dan meningkat menjadi 77,73 pada tahun 2013.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan relatif lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.

Ini memberikan indikasi bahwa potensi yang ada di Kota Balikpapan memiliki keunggulan yang relatif lebih baik dan patut untuk terus dipelihara dan dikembangkan dalam peningkatan pembangunan di segala bidang secara berkelanjutan.

Jika dilihat trend-nya, perkembangan kenaikan IPM Kota Balikpapan juga memiliki kaitan yang erat dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama ini. Beberapa penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa terdapat hubungan timbal balik (*two-way relationship*) antara modal manusia (*human capital*) dan pertumbuhan ekonomi. Pertama adalah dari pertumbuhan ekonomi ke pembangunan manusia (*human development*). Perekonomian (PDRB) mempengaruhi pembangunan manusia, khususnya melalui aktivitas rumah tangga dan pemerintah. Disisi lain, dengan semakin tingginya pembangunan manusia, maka akan mempengaruhi ekonomi melalui peningkatan kemampuan atau kapabilitas masyarakat. Sebagai konsekuensinya akan mengakibatkan peningkatan kreatifitas dan produktivitas masyarakat.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, LPE Kota Balikpapan dalam periode 2009-2012 mengalami *trend* peningkatan, tapi pada tahun 2013 mengalami perlambatan dikarenakan beberapa faktor diantaranya kenaikan BBM, dimana pada tahun 2014 diproyeksi mencapai 6,33%. Besaran perekonomian yang diindikasikan dengan nilai PDRB juga mengalami perkembangan setiap tahunnya. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Balikpapan pada tahun 2009 mencapai Rp.17,46 triliun dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp.31,6 triliun pada tahun 2014, atau tumbuh sebesar 80,98%. Jika dihitung menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan, pada tahun 2009 nilainya mencapai Rp 10,39 triliun dan diproyeksi meningkat menjadi Rp 15,1triliun di tahun 2014, atau tumbuh sebesar 45,3%.

Indikasi kesejahteraan masyarakat yang dapat ditunjukkan dengan pendapatan per kapita juga menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Jika pada tahun 2009 pendapatan per kapita baru mencapai Rp 24,03 juta/orang, diproyeksikan pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi Rp 39,84 juta/orang.

Inflasi Kota Balikpapan pada tahun 2014 adalah sebesar 7,22%. Inflasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat inflasi secara nasional yang berada di level

8,36% pada tahun 2014. Jika dilihat *trend* perkembangan tingkat inflasi Kota Balikpapan selama periode 2009-2014 menunjukkan cukup terjadi fluktuasi tiap tahunnya. Pada tataran regional Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2009 tingkat inflasinya berada di atas Kota Balikpapan, yaitu sebesar 9,65 %

Inflasi Kota Balikpapan di tahun 2014 telah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 8,56 %. Komoditas penyumbang inflasi selama tahun 2014 didominasi oleh kelompok *administered price* dan juga *volatile food*, pada kelompok faktor *administered price*, kebijakan pengurangan subsidi BBM serta kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada tahun 2014 menyebabkan komoditi bensin, angkutan dalam kota, dan tarif listrik masuk dalam komoditas penyumbang inflasi terbesar selama tahun 2014.

Sementara pada *volatile foods* masih besarnya ketergantungan pasokan bahan pokok dari daerah lain serta meningkatnya distribusi sebagai efek tidak langsung dari meningkatnya harga BBM menyebabkan beberapa komoditas seperti beras turut memberikan andil yang cukup besar terhadap inflasi kota Balikpapan di tahun 2014.

Inflasi Kota Balikpapan dipengaruhi oleh distribusi, bila distribusi mengalami gangguan terutama kondisi iklim yang kurang baik, serta sentra produksi mengalami gangguan dapat mengakibatkan pasokan yang masuk ke kota Balikpapan mengalami keterlambatan dikarenakan sebagian besar didatangkan dari luar Balikpapan.

Kedepannya tantangan terbesar inflasi kota Balikpapan adalah tinggi inflasi bahan makanan (*volatile foods*), terutama komoditi beras, daging, ikan dan hortikultura, dalam rangka menanggulangi permasalahan tersebut pada tahun 2014 melalui Tim Pengendali Inflasi daerah (TPID) kota Balikpapan telah menggalakan kegiatan ketahanan pangan, melalui kegiatan rumah pangan lestari, dan menyebarkan informasi melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS).

Jumlah pengangguran/ pencari kerja di Kota Balikpapan dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Jika pada tahun 2012 mencapai 34.773 jiwa, pada tahun 2013 menurun menjadi sebesar 24.963 jiwa dan pada tahun 2014 adalah sebesar 22.564 jiwa. Pengangguran/ pencari kerja adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 tahun keatas) yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja), dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (sebelumnya dikategorikan pekerjaan bekerja), dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (*jobless*). Trend pengangguran di Kota Balikpapan

mengalami penurunan dan diharapkan dapat terus berkurang seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat.

Meningkatnya aktivitas perekonomian pada beberapa sektor perekonomian, mendorong penyerapan tenaga kerja yang lebih besar, terutama pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah daerah Kota Balikpapan dalam aspek ketenagakerjaan (*pro-job*) juga memberikan kontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran yang ada.

D. DATA ORGANISASI

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah kota Balikpapan membentuk Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dengan rincian SKPD sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- b. Inspektorat;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Badan Lingkungan Hidup;
- e. Badan Kepegawaian Daerah;
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- g. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- h. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
- i. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. Dinas Daerah :
 - 1) Dinas Pendidikan;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum;
 - 4) Dinas Tata Kota dan Perumahan;
 - 5) Dinas Perhubungan;

- 6) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 7) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;
 - 8) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 - 9) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 10) Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
 - 11) Dinas Pendapatan Daerah;
 - 12) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
 - 13) Dinas Pasar.
- k. Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Kelas B;
- l. Satuan Polisi Pamong Praja;
- m. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- n. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- o. Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan
- p. Kecamatan :
- 1) Kecamatan Balikpapan Barat;
 - 2) Kecamatan Balikpapan Utara;
 - 3) Kecamatan Balikpapan Tengah;
 - 4) Kecamatan Balikpapan Selatan;
 - 5) Kecamatan Balikpapan Timur;
 - 6) Kecamatan Balikpapan Kota.
- q. Kelurahan :
- 1) Kelurahan Baru Ilir;
 - 2) Kelurahan Baru Ulu;
 - 3) Kelurahan Baru Tengah;
 - 4) Kelurahan Kariangau;
 - 5) Kelurahan Margo Mulyo;

- 6) Kelurahan Marga Sari;
- 7) Kelurahan Batu Ampar;
- 8) Kelurahan Gunung Samarinda;
- 9) Kelurahan Karang Joang;
- 10) Kelurahan Muara Rapak;
- 11) Kelurahan Gunung Sari Ulu;
- 12) Kelurahan Gunung Sari Ilir;
- 13) Kelurahan Karang Jati;
- 14) Kelurahan Sumber Rejo;
- 15) Kelurahan Karang Rejo;
- 16) Kelurahan Mekar Sari;
- 17) Kelurahan Sepinggan;
- 18) Kelurahan Gunung Bahagia;
- 19) Kelurahan Damai;
- 20) Kelurahan Klandasan Ulu;
- 21) Kelurahan Klandasan Ilir;
- 22) Kelurahan Prapatan;
- 23) Kelurahan Telaga Sari;
- 24) Kelurahan Teritip;
- 25) Kelurahan Lamaru;
- 26) Kelurahan Manggar;
- 27) Kelurahan Manggar Baru;
- 28) Kelurahan Sungai Nangka;
- 29) Kelurahan Sepinggan Baru;
- 30) Kelurahan Damai Baru;
- 31) Kelurahan Damai Bahagia;

- 32) Kelurahan Graha Indah;
- 33) Kelurahan Gunung Samarinda Baru;
- 34) Kelurahan Sepinggan Raya.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

A. GAMBARAN UMUM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan amanat perundang-undangan diatas, dan dengan telah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, Pemerintah Kota Balikpapan telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan 2006 – 2026.

RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota Balikpapan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Penyusunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011–2016 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat serta dialog yang melibatkan *stakeholders* kunci. Disamping itu penyusunan RPJMD ini mempedomani RPJP Kota Balikpapan, memperhatikan RPJMD Provinsi dan mengacu pada RTRW Provinsi dan Kabupaten Kota.

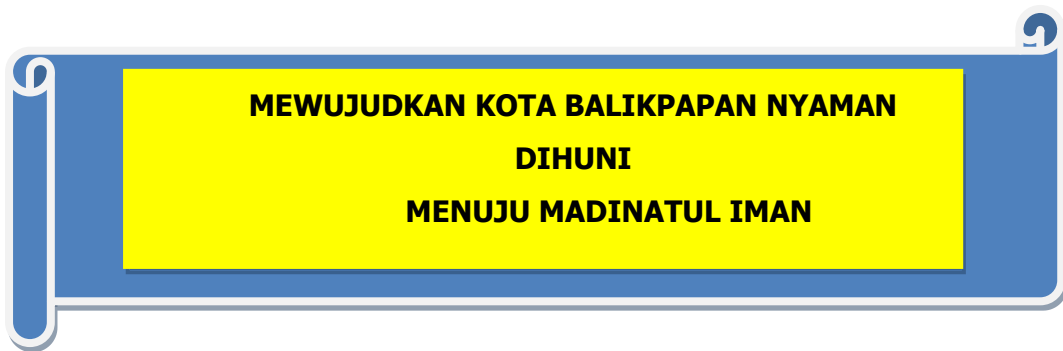
Tahun 2015 merupakan tahun ke empat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan 2011-2016 serta merupakan tahun ketiga kepemimpinan Walikota/Wakil Walikota Balikpapan Periode 2011-2016.

Sinkronisasi, sinergitas dan kesinambungan program kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Balikpapan menjadi prioritas dalam program kegiatan tahun 2015

1) Visi Dan Misi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kota Balikpapan untuk periode RPJMD 2011-2016 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:



Penjelasan Visi diatas bermakna sebagai berikut :

- a. Kota Balikpapan sebagai Kota Nyaman Dihuni (*Livable City*) adalah suatu kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll).

Prinsip-prinsip dari *Livable City* diantaranya :

- 1) Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik);
- 2) Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas kesehatan/ kesehatan/ ibadah);
- 3) Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi;
- 4) Keamanan, bebas dari rasa takut;
- 5) Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya;
- 6) Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

b. **Madinatul Iman**, mengandung makna sebagai berikut :

- 1) Suatu sistem sosial yang tumbuh dan berkembang, yang berasaskan pada prinsip moral.
- 2) Menjamin kebebasan perorangan dengan tetap memperhatikan kestabilan masyarakat.
- 3) Mendorong daya usaha dan inisiatif individu di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan.
- 4) Tatanan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan berperadaban maju.

Untuk mewujudkan visi jangka menengah di atas, ditetapkan Misi dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2011 - 2016 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Beriman;
2. Membangun Kewirausahaan dan Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat;
3. Meningkatkan Ketertiban Umum, Penegakan Hukum, Pemberantasan KKN dan Penanganan Masalah Sosial;
4. Meningkatkan Investasi, Memperkokoh Ekspektasi Dunia Usaha dan Memperluas Lapangan Kerja;
5. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Melaksanakan Reformasi Birokrasi;
6. Meningkatkan Infrastruktur Kota yang Representatif;
7. Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan serta Perlindungan Anak;
8. Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Mengembangkan Pariwisata serta Melestarikan Keragaman Budaya dan Kegotongroyongan.

2) Tujuan Dan Sasaran

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2011-2016, sebagai berikut :

MISI 1

Meningkatkan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia Yang Beriman

- Tujuan 1 : Meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan masyarakat.
- Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas/mutu pendidikan ;
2. Meningkatnya aksesibilitas memperoleh pendidikan ;
3. Meningkatnya kualitas tenaga kerja.
- Tujuan 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- Sasaran : 1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat ;
2. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan.
- Tujuan 3 : Meningkatkan pembinaan pemuda dan olahraga.
- Sasaran : 1. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan ;
2. Meningkatnya kualitas dan prestasi olahraga.
- Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas keagamaan masyarakat.
- Sasaran : 1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama ;
2. Meningkatnya kerukunan intra dan antar umat beragama.

MISI 2

Membangun Kewirausahaan Dan Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat.

- Tujuan 1 : Mengembangkan Kewirausahaan UMKM dan Koperasi.
- Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM dan Koperasi ;
2. Meningkatnya kualitas produk UMKM dan Koperasi.
- Tujuan 2 : Memantapkan kemandirian Ekonomi masyarakat.
- Sasaran : 1. Meningkatnya produktivitas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
2. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

MISI 3

Meningkatkan Ketertiban Umum, Penegakan Hukum, Pemberantasan KKN Dan Penanganan Masalah Sosial

- Tujuan 1 : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.
- Sasaran : Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
- Tujuan 2 : Meningkatkan kesadaran hukum dan pemberantasan KKN.
- Sasaran : Meningkatnya partisipasi politik Masyarakat.
- Tujuan 3 : Mengentaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- Sasaran : 1. Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ;
2. Meningkatnya kemandirian masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- Tujuan 4 : Meningkatkan peranan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Bencana.
- Sasaran : 1. Meningkatnya sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan bencana ;
2. Meningkatnya partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana.

MISI 4

**Meningkatkan Investasi, Memenuhi Ekspektasi Dunia Usaha,
Dan Memperluas Lapangan Kerja.**

- Tujuan 1 : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif.
Sasaran : Meningkatnya pelayanan administrasi dan perizinan investasi.
Tujuan 2 : Meningkatkan investasi berbasis keunggulan daerah.
Sasaran : Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.
Tujuan 3 : Menciptakan dan memperluas lapangan kerja.
Sasaran : Meningkatnya lapangan usaha dan lapangan kerja.
Tujuan 4 : Meningkatkan Sumber-sumber pendapatan daerah dan pembiayaan daerah.
Sasaran : Meningkatnya sumber sumber pendapatan daerah;

MISI 5

**Meningkatkan Pelayanan Publik Dan Melaksanakan
Reformasi Birokrasi**

- Tujuan 1 : Meningkatkan pelayanan publik yang prima
Sasaran : Meningkatnya Kapasitas institusi penyelenggara pelayanan publik;
Tujuan 2 : Melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan.
Sasaran : 1. Terlaksananya reformasi birokrasi

MISI 6

Meningkatkan Infrastruktur Kota Yang Representatif.

- Tujuan 1 : Menyediakan prasarana dan sarana perhubungan yang nyaman, aman, efisien dan ramah lingkungan.
- Sasaran : 1. Meningkatnya manajemen dan fasilitas perlengkapan jalan ;
2. Terwujudnya Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM).
- Tujuan 2 : Menyediakan pelayanan air bersih/minum dan pengelolaan air limbah.
- Sasaran : 1. Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih/air minum ;
2. Tersedianya sistem jaringan dan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) terpadu.
- Tujuan 3 : Meningkatkan upaya pengendalian dan penanggulangan banjir dalam kota
- Sasaran : Mengurangi titik/lokasi banjir, luas wilayah banjir dan lama waktu genangan.
- Tujuan 4 : Menciptakan perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni
- Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas perumahan dikawasan permukiman kumuh ;
2. Terwujudnya penyediaan hunian vertikal (rusunawa dan rusunami) ;
3. Terwujudnya sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.
- Tujuan 5 : Menyediakan ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
- Sasaran : 1. Tersedianya struktur dan pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
2. Tersedianya tata ruang pesisir, dan pulau-pulau kecil ;
3. Terkendalinya pemanfaatan ruang.

MISI 7

Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Masyarakat Dan Perempuan Serta Perlindungan Anak.

- Tujuan 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga
 Sasaran : Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam program Keluarga Berencana.
- Tujuan 2 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat
 Sasaran : Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna.
- Tujuan 3 : Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender
 Sasaran : Meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga dan lingkungan kerja ;
- Tujuan 4 : Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.
 Sasaran : Meningkatnya kualitas anak.

MISI 8

**Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Hidup Dan
 Mengembangkan Pariwisata Serta Melestarikan Keragaman
 Budaya Dan Kegotongroyongan.**

- Tujuan 1 : Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup selaras dengan pengembangan ekonomi kota (eco2cities)
 Sasaran : 1. Terwujudnya peningkatan pelestarian dan pengembangan kawasan hutan, lahan dan DAS;
 2. Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota ;
 3. Meningkatnya upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan peran serta aktif masyarakat.
- Tujuan 2 : Mengembangkan dan melestarikan heterogenitas budaya
 Sasaran : Meningkatnya upaya pelestarian ragam seni dan budaya yang ada di Kota Balikpapan.
- Tujuan 3 : Mengembangkan pariwisata yang berwawasan lingkungan
 Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata
 2. Berkembangnya usaha-usaha pendukung kepariwisataan.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) berisikan perencanaan yang global dengan penjabaran hanya sampai kepada Program hingga perlu dioperasionalisasikan dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan namun masih dalam satu rangkuman dari seluruh perencanaan pembangunan baik untuk Kementrian/Lembaga di Pusat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Daerah, perencanaan yang lebih mikro tadi disebut dengan Rencana Kerja Perangkat (RKP) di Pusat dan RKPD di Daerah.

Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan 2015 Pemerintah Kota Balikpapan berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis pembangunan adalah sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2015

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan masyarakat	1 Meningkatnya kualitas/mutu pendidikan	1 Angka Melek Huruf	98.84
			2 Rata - Rata Lama Sekolah	10.39
2	Menciptakan dan memperluas lapangan kerja	2 Meningkatnya lapangan usaha dan lapangan kerja	1 Tingkat pengangguran	7.90%
3	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	3 Meningkatnya Status kesehatan masyarakat	1 Usia Harapan Hidup	72.26

4	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	4 Mewujudkan kondusifitas di daerah dengan mensinergikan peran-peran masyarakat dan pemerintahan dalam pembangunan	1 Penurunan Konflik	0
5	Memantapkan kemandirian Ekonomi masyarakat	5 Meningkatnya pertanian dalam arti luas	1 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	428M
6	Meningkatkan Sumber-sumber pendapatan daerah dan pembiayaan daerah	6 Menurunnya tingkat kemiskinan	1 Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)	5.60%
7	Mengentaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	7 Meningkatnya kekuatan perekonomian pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat	1 Pertumbuhan ekonomi 2 Inflasi 3 PAD 4 Pendapatan perkapita	4.6% 7.38% 539.892.356.020 60.021.818
8	Meningkatkan pelayanan publik yang prima	8 Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1 Persentase PMKS yang menerima Bantuan Sosial	95%
		9 Meningkatnya Kapasitas penyelenggara pelayanan publik	1 Skor Survei Kepuasan Masyarakat	80
9		10 Meningkatnya cakupan layanan persediaan daya listrik kepada masyarakat	1 Rasio Ketersediaan daya listrik	435.5KV
10	Meningkatkan investasi berbasis keunggulan daerah.	11 Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan	1 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	32700548

11	Melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan	12	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	1 Opini BPK 2 Indeks Persepsi Korupsi	WTP 6
12	Menyediakan prasarana dan sarana perhubungan yang nyaman, aman, efisien dan ramah lingkungan	13	Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	1 Nilai akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintahan 2 Nilai LPPD	BB 30926 (10 besar)
		14	Terwujudnya Infrastruktur Dasar	1 Presentase panjang jalan dalam kondisi baik	100%
13	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender	15	Meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga	1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88
14	Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup selaras dengan pengembangan ekonomi kota (eco2cities)	16	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 1 Skor Survei Kepuasan masyarakat terhadap kebersihan dan Keindahan kota	63.38% 80

C. Perjanjian Kinerja Kota Balikpapan

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja

Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2015.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya Indikator.

Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus di organisasi. Perjanjian Kinerja yang akan dicapai untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Kota Balikpapan Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas/mutu pendidikan	1. Angka Melek Huruf	98.84
		2. Rata - Rata Lama Sekolah	10,39
2	Meningkatnya lapangan usaha dan lapangan kerja	1. Tingkat pengangguran	7.90%
3	Meningkatnya Status kesehatan masyarakat	1. Usia Harapan Hidup	72.26
4	Mewujudkan kondusifitas di daerah dengan mensinergikan peran-peran masyarakat dan pemerintahan dalam pembangunan	1. Penurunan Konflik	0
5	Meningkatnya pertanian dalam arti luas	1. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	428M
6	Menurunnya tingkat kemiskinan	1. Indeks kemiskinan Manusia (IKM)	5.60
7	Meningkatnya kekuatan perekonomian pada umumnya	1. Pertumbuhan ekonomi	4.6
		2. Inflasi	7.38%

	dan kesejahteraan masyarakat	3 PAD 4 Pendapatan perkapita	539.892356.060 61.021.818
8	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1 Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Sosial	95%
9	Meningkatnya Kapasitas penyelenggara pelayanan publik	1 Skor Survei Kepuasan Masyarakat	80
10	Meningkatnya cakupan layanan persediaan daya listrik kepada masyarakat	1 Rasio Ketersediaan daya listrik	435.5 kv
11	Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan	1 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	32700548,56
12	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	1 Opini BPK 2 Indeks Persepsi Korupsi	WTP 6.0
13	Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	1 Nilai akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintahan 2 Nilai LPPD	BB 30926 (10 besar)
14	Terwujudnya Infrastruktur Dasar	1 Presentase panjang jalan dalam kondisi baik	100%
15	Meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga	1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	80
16	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2. Skor Survei Kepuasan masyarakat terhadap kebersihan dan Keindahan kota	63.38% 80

2.1. Rencana Anggaran Tahun 2015

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp 3.431.637.949.914,40 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.:

Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No.	Uraian	Rencana Anggaran	%
1	Belanja Langsung	Rp. 2.353.610.037.029,00	91.89
2.	Belanja Tidak langsung	Rp. 1.078.027.912.885,80	81.45
	Jumlah	Rp. 3.431.637.949.914,40	84.75

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Alokasi per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2015

No.	Sasaran	Anggaran
1	Meningkatnya kualitas/mutu pendidikan	Rp. 137.353.692.800,-
2	Meningkatnya lapangan usaha dan lapangan kerja	Rp. 3.887.425.000,-
3	Meningkatnya Status kesehatan masyarakat	Rp. 69.898.848.050,-
4	Mewujudkan kondusifitas di daerah dengan mensinergikan peran-peran masyarakat dan pemerintahan dalam pembangunan	Rp. 8.645.845.000,-
5	Meningkatnya pertanian dalam arti luas	Rp. 6.546.402.450,-
6	Menurunnya tingkat kemiskinan	-

7	Meningkatnya kekuatan perekonomian pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat	Rp. 284.330.000,-
8	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Rp. 4.558.497.600,-
9	Meningkatnya Kapasitas penyelenggara pelayanan publik	Rp. 868.496.750,-
10	Meningkatnya cakupan layanan persediaan daya listrik kepada masyarakat	-
11	Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan	Rp. 10.774.619.500,-
12	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	-
13	Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Rp. 440.930.500,-
14	Terwujudnya Infrastruktur Dasar	Rp. 890.199.028.896,-
15	Meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga	Rp. 5.344.100.000,-
16	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	Rp. 15.037.009.250,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kota Balikpapan selaku pengemban amanah masyarakat Kota Balikpapan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah memenuhi tuntutan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2012-2016 maupun RKPD Tahun 2014. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Mengacu pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Untuk memudahkan digunakan media **formulir Pengukuran Kinerja**, atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Area* Kota Balikpapan sebagai kota yang layak dihuni menuju madinatul iman.

3.1. Laporan Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2014 dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan Laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 yang dilakukan oleh Kementerian PAN & RB tertanggal 1 Desember 2014, dinyatakan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan mendapatkan nilai 58,75 atau dengan predikat penilaian CC (cukup).

a). Rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian PAN &RB adalah sebagai berikut:

- Melakukan Reviu terhadap Sasaran Strategis Serta Indikator Kinerja RPJMD.
- Melakukan Reviu dan penyempurnaan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan juga Perjanjian Kinerja, untuk memastikan kualitas indikator yang ditetapkan tetap terjaga, dengan memperhatikan kriteria indikator yang baik atau spesifik, relevan, terukur dan cukup. Selanjutnya, diharapkan PK dapat dibuat sampai ke level Eselon III dan IV.
- Mengembangkan Aplikasi Manajemen Kinerja yang dapat memantau perkembangan capaian Kinerja Baik pada tataran SKPD maupun Pemerintah Kota.
- Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

b). Tindak Lanjut Pemerintah Kota Balikpapan:

1. Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan Reviu dan Penyempurnaan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) . Indikator Kinerja Utama yang awalnya memiliki 46 Sasaran Strategis dan 182 Indikator kinerja Utama telah direvisi menjadi 16 sasaran strategis dan 23 IKU. Hal ini dilakukan dengan mengkaji ulang Sasaran Strategis dan indikator yang dianggap kurang relevan, kurang spesifik, tidak terukur dan masih jauh dari jauh dari kata cukup. (*dokumen terlampir*)
2. Perjanjian Kinerja (PK) yang semula hanya dibuat pada level Eselon saja, saat ini telah dibuat hingga ke level Eselon III dan IV. Hal ini dimaksudkan agar SKPD terkait memahami tugas dan fungsinya hingga sampai ke level pelaksana kegiatan.
3. Hasil reviu sasaran strategis dan IKU dijadikan rujukan dalam penyusunan sasaran strategis dan IKU RPJMD Periode 2011-2016
4. Pemanfaatan aplikasi untuk penyusunan LKJ tahun 2015 belum dapat dilaksanakan sebab tahun 2016 BAPPEDA sedang merintis pengintegrasian aplikasi perencanaan dan pelaporan sehingga dari Bagian Organisasi tidak menemukan aplikasi LKJ tersendiri nantinya apakah pelaporan akan dibangun bersamaan dengan aplikasi perencanaan yang terintegrasi.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

- 85 s.d. 100 = **Baik Sekali**
- 70 s.d. <85 = **Baik**
- 55 s.d. <70 = **Cukup**
- < 55 = **Kurang**

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel berikut, selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kota Balikpapan untuk tahun 2015. Pencapaian IKU Walikota Balikpapan tahun 2015 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

**Pencapaian IKU Kota Balikpapan
Tahun 2015**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2015			Target Akhir Rpjmd	Capaian 2015 Terhadap RPJMD 2016
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya kualitas/mutu pendidikan	1 Angka Melekat Huruf .	98.84	98.86	100.02	98.49	81.19%
		2 Rata - Rata Lama . Sekolah	10.39	10.41	102.35	10.20	102.05%
2	Meningkatnya lapangan usaha dan lapangan kerja	1 Tingkat . pengangguran	7.90%	8.17%	96.16	5.2%	63.64%
3	Meningkatnya Status kesehatan masyarakat	1 Usia Harapan Hidup .	72.26	73.94	102.32	72.3	102.26%
4	Mewujudkan kondusifitas di daerah dengan mensinergikan peran-peran masyarakat dan pemerintahan dalam pembangunan	1 Penurunan Konflik	0	0	100%	0	100%
5	Meningkatnya pertanian dalam arti luas	1 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	428M	669M	156	550M	121%

6	Menurunnya tingkat kemiskinan	1 Indeks Kemiskinan Manusia	5.60	5.61	99.82	6	89.12%
7	Meningkatnya kekuatan perekonomian pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat	1 Pertumbuhan ekonomi	4.6%	3.98%	86.53%	7.92%	50.25%
		2 Pendapatan Perkapita	61021818	64433173	105.6%	67844528	94.97%
		3 PAD	539892356090	582744865141	107.94%	593881591699	98.12%
		4 Inflasi	7.38%	6.26%	159,74%	7.46%	119%
8	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1 Persentase PMKS yang menerima Bantuan Sosial	95%	78,8%	83%	100%	78.85%
9	Meningkatnya Kapasitas penyelenggara pelayanan publik	1 Skor Survei Kepuasan Masyarakat	80	79.36	99.2%	85	93.36
10	Meningkatnya cakupan layanan persediaan daya listrik kepada masyarakat	1 Rasio Ketersediaan daya listrik	435.5KW	432.35KW	99.27	**	**
11	Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan	1 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	39481688	39481688	100%	**	**
12	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	1 Opini BPK	WTP	WTP	100%	WTP	100%
13	Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	2 Indeks Persepsi Korupsi	6.0	6.62	110.3%	6.5	101.84 %
		1 Nilai akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintahan	BB	CC	-	BB	-
		2 Nilai LPPD	3.0926	3.0829	99.82%	3.0926	99.82%
14	Terwujudnya Infrastruktur Dasar	1 Persentase Panjang Jalan	80%	100%	125%	100%	100%
15	Meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga	1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88	90.05	102.32%	90	100.05%
16	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63.38	63.38	100	63.95	99.10 %

	2	Skor Survei	80	84.2	105.25 %	85	99.05%
	.	Kepuasan masyarakat terhadap kebersihan dan Keindahan kota					

*** tidak ditargetkan pada dokumen RPJMD*

Dari 24 Indikator Kinerja Utama (IKU) Walikota tahun 2015, mayoritas kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa ada 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama IKU yang dalam pencapaiannya melebihi target yang ditetapkan, kemudian terdapat 3 (tiga) Indikator yang mencapai target, serta 6 indikator yang masih belum mencapai target 100% tetapi sudah dapat masuk dalam Kriteria tinggi yaitu dengan realisasi kinerja ≤ 90 .

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2015 disajikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas/ Mutu Pendidikan

Indikator : 1. Angka Melek Huruf

2. Rata- rata Lama Sekolah

No.	Indikator Kinerja Utama	Target tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Target Akhir RPJMD	Capaian 2015 Terhadap RPJMD 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Angka melek Huruf	98.84	98.86	100.02%	98.49%	81.19
2.	Rata – rata Lama Sekolah	10.17	10.41	102.3%	10.20	102.50%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian sasaran 1, yaitu meningkatnya kualitas/mutu pendidikan secara umum telah tercapai dan melebihi dari target.

1). Angka Melek Huruf

Dalam perencanaan pembangunan wilayah, Angka Melek Huruf (AMH) digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Pemerintah Kota Balikpapan menetapkan Angka Melek Huruf pada dokumen RPJMD 2011-2016 sebagai salah satu indikator yang menunjang pencapaian misi Walikota Balikpapan yaitu, **Meningkatnya Kualitas Daya Saing Manusia yang Beriman.**

Dari tabel di atas, dapat dilihat realisasi pencapaian target Angka Melek Huruf pada tahun 2015 menunjukkan hasil yang positif. Realisasi kinerja tahun 2015 menunjukkan bahwa Angka Melek Huruf telah melebihi target yang ditetapkan, dengan pencapaian sebanyak 100,02% dari target 98,84. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik untuk sasaran ini. Sedangkan bila dilihat dalam kaitannya dengan target kinerja pada akhir tahun RPJMD, pencapaian ini telah mencapai 98,49% dari rencana kinerja tahun 2016.

**Angka Melek Huruf Kota Balikpapan
Tahun 2011-2015**

No.	Indikator	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Angka Melek Huruf	79.70	79.97	98.64	99.83	99.84

Sumber: Dinas pendidikan Kota Balikpapan

Jika dibandingkan dengan Angka Melek Huruf Provinsi Kalimantan Timur yang telah mencapai 98,64 persen atau melebihi target tahun 2014 yang diprediksikan sebesar 98,40 persen. Namun, rata-rata lama sekolah masih dibawah target dari 10 tahun atau hanya mencapai 9,6 tahun, sedangkan Pemerintah Kota Balikpapan telah mencapai target 10 tahun untuk rata- rata lama sekolah.

Upaya Pemerintah Kota Balikpapan :

Keberhasilan pencapaian target ini dikarenakan kemudahan pada akses pendidikan sebagai efek kebijakan pendidikan pemerintah pusat yang diaplikasikan oleh pemerintah kota Balikpapan:

- komitmen untuk mengalokasikan 20 persen dari APBN dan APBD untuk anggaran pendidikan. Realisasi dari anggaran pendidikan ini dapat berupa bantuan seperti Biaya Operasional Sekolah (BOS) . Dengan adanya BOS, biaya pendidikan dasar dan wajib belajar sampai pada tingkat SLTA menjadi lebih ringan. Bantuan lain dapat berupa buku-buku, dan beasiswa.
- penambahan jumlah dan kualitas sarana serta prasarana pendukung pendidikan seperti penambahan jumlah sekolah, jumlah gedung sekolah, kelengkapan lab-lab penunjang pelajaran serta transportasi siswa
- meningkatnya kualitas pendidik dan kesejahteraan pendidik. Peningkatan kualitas melalui pemberian pelatihan bagi guru dan beasiswa guru untuk melanjutkan pendidikan serta peningkatan kesejahteraan dengan pemberian insentif dan lain-lain

2). Rata- rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran ini menunjukkan bahwa capaian kinerjanya sangat baik, karena mencapai 102,3% dari target yang dirumuskan Pada tahun 2015. Realisasi capaian di tahun 2015 juga telah melebihi target yang ditetapkan di akhir tahun 2016 penyelenggaraan RPJMD yaitu rata- rata lama sekolah selama 10 tahun.

**Matrik Rata- rata Lama Sekolah
Kota Balikpapan Tahun 2011-2014**

Skala	2011	2012	2013	2014
Balikpapan	10.16	10.29	10.39	10.41
Kalimantan Timur	8.79	8.83	8.87	9.04
Nasional	7.52	7.59	7.61	7.73

sumber: ipm.go.id

Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk di Pemerintah Kota Balikpapan, selama 2011-2014 terjadi peningkatan kualitas pendidikan yaitu dari 10.28 di tahun 2011 menjadi 10.41 di tahun 2014 (setara SLTA). Peningkatan rata-rata lama sekolah di Pemerintah Kota Balikpapan ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kota Balikpapan semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Selain Rata- rata lama sekolah, akses pendidikan juga bisa digambarkan oleh beberapa data lain seperti Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Selain itu, juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas pendidikan yang terjangkau, seperti data tentang rasio antara jumlah murid dengan jumlah guru atau sarana dan prasarana pendidikan yang lain. Bagian berikut akan menguraikan situasi untuk beberapa aspek tersebut di atas.

- **Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)**

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator untuk melihat angka pendidikan di setiap jenjangnya tanpa melihat umur penduduk yang mengenyam bangku sekolah. APK Pemerintah Kota Balikpapan dalam 3 tahun terakhir untuk SD/MI mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa persentase jumlah penduduk diluar usia SD/MI (7-12 tahun) yang bersekolah di jenjang SD/MI semakin menurun mengingat persentase sudah melebihi 100 persen namun meningkat di tiap tahunnya. Sedangkan pada APK jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA secara umum terlihat trendnya meningkat di tiap tahunnya. dapat dilihat dari gambar berikut berikut:

Data APK Kota Balikpapan Tahun 2011-2015

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Data APK SD/MI	103.31%	106.26%	111.40%	106.19%	112.65%
Data APK SMP/MTs	103.01%	95.45%	104.80%	97.56%	103.38%
Data APK SMA/MA	70.39%	83.15%	93.29%	82.19%	83.17%

Sumber: kemendikbud.go.id

Data APM Kota Balikpapan tahun 2011- 2015

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Data APM SD/MI	103.31%	106.26%	111.40%	106.19%	112.65%
Data APM SMP/MTs	74.67%	78.29%	74.91%	80.59%	86.59%
Data APM SMA/MA	52.51%	60.88%	67.68%	57.91%	67.38%

Sumber: kemendikbud.go.id

- Rasio Murid Terhadap Guru**

Rasio ini menggambarkan tingkat perbandingan guru terhadap murid dimana memperlihatkan kecukupan jumlah guru disuatu wilayah terhadap jumlah murid yang harus diajar.

Rasio Murid Terhadap Guru**Kota Balikpapan Tahun 2011-2015**

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
SD/MI	21.95	22.13	21.96	17.15	21.15
SMP/MTS	15.69	16.88	17.13	7.96	18.34

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kota Balikpapan

- Angka Kelulusan**

Angka Kelulusan Kota Balikpapan dapat dihitung dari jumlah lulusan pada jenjang sekolah (SD/SMP/SMA) dibagi Jumlah siswa tingkat tertinggi pada ajaran sebelumnya.

Angka Kelulusan**Kota Balikpapan Tahun 2015**

SD/MI	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	orang	10901	100 %
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya	orang	10901	
SMP/MTs	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	orang	9924	100 %

	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	orang	9924	
SMA/SMK/MA	Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA	orang	7936	<u>99.70%</u>
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya	orang	7960	

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

Program yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah pada tahun 2015 adalah:

1. Program Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)
2. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
3. Program pendidikan menengah
4. Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Hambatan/ Masalah :

- Indikator jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat profesi melampaui target, sebab selain melalui APBD, terdapat program sertifikasi profesi yang dilaksanakan melalui anggaran pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Namun demikian jumlah tersebut jika dibandingkan dengan total jumlah guru keseluruhan guru yang bersertifikasi baru 60 %, hal ini dikarena terbatasnya kuota sertifikasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur atau Pemerintah Pusat, sehingga proses sertifikasi guru harus dilaksanakan secara bertahap.
- Masih ada sekolah yang menerapkan double shift dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, terutama pada sekolah – sekolah yang diminati masyarakat.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan:

- Melaksanakan Verifikasi berkas tenaga pendidik dan mengkoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat untuk meminta kuota program sertifikasi, disamping tetap mengalokasikan program sertifikasi melalui APBD.

- Pada PSB tahun 2015 sudah diputuskan untuk menerapkan PSB on-line, sehingga jumlah siswa yang diterima sekolah – sekolah terdata riil time di Dinas Pendidikan, dengan demikian jumlah siswa per rombel akan dapat dijaga sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sasaran 2 : Meningkatnya Lapangan Usaha dan Lapangan Kerja

Indikator : Tingkat Pengangguran

No.	Indikator Kinerja Utama	Target tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Target Akhir RPJMD	Capaian 2015 Terhadap RPJMD 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tingkat Pengangguran	7.90%	8.17%	96.69%	5.2%	63.64%

Tingkat Pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Hambatan/ Masalah :

- Lesunya pertambangan di Kota Balikpapan.
- Ketidaksesuaian antara lulusan sekolah dengan kebutuhan perusahaan. Sehingga semakin banyak lulusan sekolah yang menganggur karna tidak diterima bekerja di perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan.
- Masih rendahnya kualitas SDM menjadi penilaian tersendiri bagi perusahaan penerima calon pekerja. Masih banyaknya pelamar kerja dan bahkan karyawan yang sudah dipekerjakan tidak memenuhi standar yang diinginkan perusahaan terkait.

Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan:

- Langkah pemerintah kota Balikpapan melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial dalam rangka mengurangi jumlah pencari kerja adalah dengan mengadakan Bursa tenaga kerja.
- Mengadakan pelatihan gratis, dan pemagangan kerja serta bimbingan bagi para pencari kerja dalam meningkatkan skill/ kemampuan kerja bagi para pencari kerja.

Sasaran 3 : Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat

Indikator : Angka Harapan Hidup

No.	Indikator Kinerja Utama	Target tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Target Akhir RPJMD	Capaian 2015 Terhadap RPJMD 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Angka Harapan Hidup	72.26	73.95	102.33%	72.5	102 %

Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Balikpapan Tahun 2015 mencapai angka 73.95, capaian tahun ini melebihi target yang ditetapkan pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yaitu 72.26, bahkan telah melampaui target yang ditetapkan pada akhir tahun RPJMD. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Balikpapan memberikan perhatian yang besar dalam meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan.

Angka Harapan Hidup Kota Balikpapan Terhadap Nasional dan Provinsi

Skala	2010	2011	2012	2013	2014
Balikpapan	73.90	73.91	73.92	73.93	73.94
Kalimantan Timur	72.89	73.10	73.32	73.52	73.62
Nasional	69.81	70.01	70.20	70.40	70.59

Sumber : ipm.bps.go.id

Pencapaian AHH yang tinggi juga menjadi salah satu penanda penting keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama di sektor kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan angka usia harapan hidup dipengaruhi dari beberapa faktor yang dalam hal ini faktor kesehatan lebih berperan penting selain faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan.

Faktor – factor lain yang akan mempengaruhi tercapainya Angka Harapan Hidup adalah:

a). Menurunnya angka Kesakitan

Menurunnya angka pesakitan ditandai dengan Meningkatnya jumlah penduduk usia >18 Tahun yang diperiksa faktor resiko terhadap Penyakit Tidak Menular dari 5%

menjadi 25% serta Meningkatnya jumlah pos pembinaan terpadu (POSBINDU) PTM menjadi 21 Pkm.

b). Peningkatan gizi masyarakat

Peningkatan Gizi masyarakat dapat dilakukan dengan adanya peningkatan pemahaman, kesadaran kemandirian masyarakat dalam deteksi dini dan upaya penanggulangan masalah gizi masyarakat. Selain itu pula terdapat beberapa aspek yang menjadi penunjang keberhasilan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat dapat dilihat pada table berikut:

**Matrik Aspek Penunjang Tercapainya
Peningkatan gizi masyarakat**

No	Hal yang akan dicapai	Aspek Penunjang	Capaian Kinerja	
			2014	2015
1	Meningkatnya pemahaman, kesadaran kemandirian masyarakat dalam deteksi dini dan upaya penanggulangan masalah gizi masyarakat	Meningkatnya angka partisipasi masyarakat, Pemerintah dan Swasta dalam penanggulangan masalah gizi masyarakat yang ditandai dengan :		
		Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan mencapai 100%	100 %	100 %
		Cakupan kunjungan bayi dan balita ke posyandu dari 79,78% menjadi 84%	80,5%	78,46%
		Cakupan ASI eksklusif dari 40% menjadi 70%	71,4%	73,07%
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin mencapai 100%	100%	100%
		Cakupan balita 6-59 bulan yang mendapat vitamin A dari 80% menjadi 84%	77,1%	81,11%
		Cakupan ibu hamil yang mendapat tablet Fe dari 66,68% menjadi 82%	93,9%	92,12%

	Cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium mencapai 100%	97,5%	97,54%
	Tercapainya pelaksanaan surveilans gizi hingga 100%	100%	100%
	Cakupan keluarga sadar gizi (kadarzi) dari 60% menjadi 75%	71,4%	73,07%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Balikpapan 2015

c). Pelayanan kesehatan yang baik

Pelayanan Kesehatan yang baik dapat dicapai apabila telah memenuhi beberapa aspek, diantaranya adalah dengan tersedianya fasilitas serta sarana dan prasarana kesehatan yang mendukung pelayanan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah kota Balikpapan menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat mulai dari Rumah Sakit Umum (1 unit) Hingga Puskesmas. Jumlah Puskesmas di Balikpapan sebanyak 27 Puskesmas untuk 34 Kelurahan dan 6 Kecamatan sekiranya cukup memadai untuk melakukan pelayanan kesehatan cepat tanggap terhadap masyarakat kota Balikpapan. Peningkatan pelayanan puskesmas juga terus dilakukan, diantaranya dengan Meningkatkan Puskesmas Perawatan mampu PONEID dari 4 Puskesmas menjadi 7 Puskesmas.

d). Menurunnya angka kematian bayi

Angka Kematian Bayi di Kota Balikpapan tahun 2015 berjumlah 78 Kasus. Jumlah kasus kematian bayi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014 (68 kasus). Penyebab kematian tertinggi adalah BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), asfiksia, sepsis, kelainan kongenital, pneumonia, dan diare serta penyebab lainnya.

e). Menurunnya angka kematian Ibu

Jumlah Angka Kematian Ibu di Kota Balikpapan tahun 2015 berjumlah 9 Kasus. Jumlah kasus ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu berjumlah 14 kasus. Penyebab kematian tertinggi adalah penyebab langsung yaitu eklampsia dan perdarahan.

Sasaran 4 : Mewujudkan Kondusifitas Di Daerah Dengan Mensinergikan Peran-Peran Masyarakat Dan Pemerintahan Dalam Pembangunan

Indikator : Penurunan Konflik

No.	Indikator Kinerja Utama	Target tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Target Akhir RPJMD	Capaian 2015 Terhadap RPJMD 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penurunan Konflik	0	0	100%	0	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-4 yaitu mewujudkan kondusifitas di daerah dengan mensinergikan peran masyarakat dengan pemerintah dalam pembangunan telah tercapai. Karena tidak ada konflik antar agama yang terjadi di masyarakat. Hal ini karena upaya yang dilakukan oleh kota Balikpapan dalam mengatasi konflik dilaksanakan mulai dari tingkat RT, selain itu juga tingkat partisipasi masyarakat dalam menangani konflik, sangat tinggi.

Sasaran 5 : Meningkatnya Pertanian dalam arti luas

Indikator : Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

No.	Indikator Kinerja Utama	Target tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Target Akhir RPJMD	Capaian 2015 Terhadap RPJMD 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	428M	669M	156%	550M	121%

Dari tabel diatas dapat dinyatakan bahwa pada tahun 2015 Sektor pertanian telah melebihi target yang ditetapkan dalam pencapaian kinerjanya. dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD realisasi kinerja tahun ini juga telah melebihi target akhir tahun RPJMD yang telah ditetapkan.

Hambatan/ masalah :

- Kondisi iklim/ cuaca yang tidak menentu dan musim kering yang cukup lama
- Kondisi iklim/cuaca yang tidak menentu dan musim kering yang cukup lama, sehingga pertanaman padi untuk musim gadum (April-September) tidak optimal.
- Karena keterbatasan modal peternak, maka penyediaan sapi yang ada di peternak Balikpapan masih fokus hanya untuk penyediaan sapi potong pada hari Raya 'Idul Adha.
- Peternak ayam petelur Kota Balikpapan sebagian besar tutup sejak tahun 2014, hanya tersisa 2 peternak saja yang masih bertahan. Hal ini disebabkan oleh tingginya harga pakan ayam petelur.
- Menurunnya produksi rumput laut karena adanya serangan penyakit rumput laut yaitu serangan "ice-ice" (sejenis bakteri) yang muncul akibat fluktuasi parameter kualitas air yang ekstrim (salinitas, suhu air laut, bahan organik terlarut dan intensitas cahaya matahari). Juga disebabkan oleh serangan hama seperti ikan baronang, penyu hijau, bulu babi dan bintang laut.
- Menurunnya produksi budidaya ikan terutama tambak karena ada beberapa tambak tidak aktif, sedangkan yang sudah aktif juga masih belum menggunakan teknik budidaya padat tebar secara optimal.
- Musim selatan pada tahun 2015 cukup panjang dan tidak menentu, kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap, juga ditambah adanya peraturan tentang larangan *transshipment* (penghentian sementara perdagangan hasil tangkapan ikan di laut), sehingga mengakibatkan penurunan produksi perikanan tangkap.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan:

- Dalam kondisi iklim/cuaca yang tidak menentu, maka upaya yang dapat dilakukan antara lain : dengan meningkatkan pertanaman padi ladang, sehingga dapat menambah produksi padi. Juga dapat dilakukan perbaikan tanggul dan pintu irigasi sebagai antisipasi pengaturan air untuk padi sawah.
- Meningkatkan populasi sapi yang ada di peternak, baik melalui pengembangan sapi bibit maupun penggemukan sapi potong yang didanai secara swadaya, dukungan pemerintah (APBD dan APBN) dan atau pihak ketiga.

- Peternak ayam telur Kota Balikpapan agar mengurangi ketergantungan pakan dari luar (impor) yang notabene harganya tinggi, dan segera mencari alternatif pakan yang dapat diproduksi sendiri dengan formula nutrisi yang berbasis pada bahan baku dari Kota Balikpapan dan sekitarnya.
- Pengendalian hama dan penyakit dalam budidaya rumput laut harus secara terpadu dan intensif, terutama pengendalian secara preventif (pencegahan).
- Tambak-tambak yang masih belum aktif sebaiknya didukung agar aktif kembali dan sudah menggunakan teknik budidaya yang tepat, sehingga produktifitasnya dapat mencapai 1 ton per ha per 1 kali budidaya.
- Dukungan terhadap sarana dan prasarana tangkap akan terus ditingkatkan melalui dukungan pemerintah, sehingga kemampuan tangkap nelayan akan meningkat dan tidak bergantung pada *transshipment*.

Sasaran 6 : Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Indikator : Indeks Kemiskinan Manusia

No.	Indikator Kinerja Utama	Target tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Target Akhir RPJMD	Capaian 2015 Terhadap RPJMD 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Kemiskinan Manusia	5.65	5.61	99.82%	6	89.12%

Pada Tahun 2015 Indeks Kemiskinan Manusia Kota Balikpapan berada di angka 5.61%, angka ini telah mencapai 99.82% dari target yang ditetapkan di Tahun 2015 dan telah mencapai 89.12% bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD di tahun 2016.

Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) didefinisikan sebagai indeks komposit yang mengukur *deprivasi* (keterbelakangan) dalam 3 (tiga) dimensi, yaitu (1) lamanya hidup, (2) pengetahuan dan (3) standar hidup layak, yang dianggap sebagai indikator inti dari ukuran deprivasi manusia. IKM pada dasarnya adalah bentuk pengukuran kemiskinan yang relatif baru dan lebih luas dari sekedar mengukur kemiskinan dari indikator pendapatan dan pengeluaran. Skala IKM terletak antara 0 (terbaik) hingga 100 (terburuk).

Artinya, makin besar skor IKM suatu wilayah, maka makin besar derajat keparahan kemiskinan wilayah itu, dan sebaliknya.

**Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) Kota Balikpapan &
Komponen Penyusunnya, Tahun 2012-2014**

Variabel IKM	2012	2013	2014
Penduduk yang diperkirakan tidak mencapai usia 40 th (%)	7,23	7,21	7,20
Angka buta huruf usia dewasa (%)	1,09	0,90	0,89
Penduduk tanpa akses terhadap air bersih (%)	2,93	2,82	2,80
Penduduk tanpa akses terhadap sarana kesehatan (%)	0,5	0,5	0,5
Balita kurang gizi (%)	13,7 ^{*)}	13,7 ^{*)}	13,5 ^{*)}
IKM	5,70	5,68	5,65

Penghitungan Indeks Kemiskinan (IKM) kabupaten / kota di Indonesia untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 1998. Secara nasional Kota Balikpapan menduduki peringkat ke 290, dimana semakin kecil angka IKM nya maka semakin besar peringkat IKM suatu kabupaten/kota. Sepanjang tahun 2002-2014, angka IKM Kota Balikpapan terus membaik. Tercatat tahun 2002 sebesar 7,98 mengalami perbaikan hingga mencapai 5,75 di tahun 2010, 5,71 tahun 2011, 5,70 tahun 2012, 5,68 persen tahun 2013 dan 5,65 persen tahun 2014. Hal ini didorong oleh membaiknya komponen- komponen pendukung dalam penghitungan IKM.

Upaya yang dilakukan :

- Dalam upaya memperpanjang Angka Harapan Hidup diperlukan gizi masyarakat yang baik dan pola kualitas kesehatan oleh karena itu pemerintah terus meningkatkan dengan membentuk pola kemitraan antara tenaga kesehatan dan non kesehatan dan meningkatkan peran swasta yang terlibat didalamnya.
- Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup bersih dan sehat, pemerintah melakukan peningkatan fasilitas penunjang dan meningkatkan peran serta stakeholders, tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai unsur terdekat dalam lingkungan.
- Pembebasan biaya pendidikan disertai dengan penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai.

Sasaran 7 : Meningkatnya Kekuatan perekonomian pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat

Indikator :

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Inflasi
3. Pendapatan perkapita
4. PAD

No.	Indikator Kinerja Utama	Target tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Target Akhir RPJMD	Capaian 2015 Terhadap RPJMD 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4.6%	3.98%	86.53%	7.92%	50.25%
2.	Inflasi	7.38%	6.26%	159.74%	7.46%	119%
3.	Pendapatan Perkapita	61021818	64433173	105.6%	67844528	94.97%
4.	PAD	5398923560 90	5827448651 41	107.94%	5938815916 99	98.12%

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2015 mengalami pelambatan, dengan capaian 86.53% dari target 4.6%. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD capaian tahun 2015 juga masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi tanpa migas mengalami tren menurun karena dampak kontraksi sektor pertambangan di Kalimantan Timur yang berpengaruh kepada sektor-sektor utama di Balikpapan (Konstruksi, Transportasi & Perdagangan).

Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2011-2016

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4.60	5.57	3.60	4.67	3.98

Sumber : Bagian Ekonomi Setdakot Balikpapan

Hambatan:

- Penurunan nilai Produksi Batubara dan nilai jual Sawit di daerah Hinterland kota Balikpapan tidak secara langsung mempengaruhi geliat aktifitas ekonomi kota Balikpapan akan tetapi aktifitas pendukung di sektor pertambangan dan aktifitas ekonomi pekerja ada di Balikpapan. Hal inilah yang berpengaruh langsung pada sector perdagangan, jasa, dan perumahan.
- Perlambatan ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2015 secara global dipengaruhi oleh menurunnya nilai jual minyak mentah dan menguatnya mata uang dolar terhadap mata uang Negara lain termasuk mata uang Rupiah.

Upaya Mengatasi Hambatan:

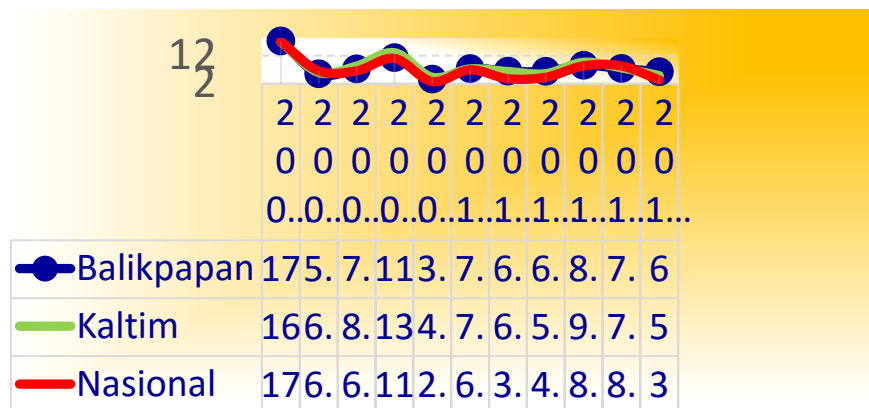
- Mempercepat proses pengembangan Coastal Road dan Kawasan industri Kariangau
- Mempermudah dan mempercepat Proses Perijinan UMKM
- Membuat Program City Branding dalam rangka *Tourism Tread Investment*, menarik investor di bidang pariwisata.

2). Inflasi

Tahun 2015, Kota Balikpapan mengalami inflasi sebesar 6,26% . Masih diatas inflasi nasional yang sebesar 3,35%. Namun angka tersebut merupakan yang terendah dalam kurun 5 tahun terakhir yang masing-masing sebesar 2011: 6.45%, 2012: 6.41%, 2013: 8.56%, dan 2014: 7.43% . Lebih rendahnya inflasi pada tahun 2015 dibandingkan beberapa tahun terakhir disebabkan Pemerintah Daerah yang semakin *concern* tentang pentingnya pengendalian inflasi.

Kelompok inflasi inti masih menjadi pemberi andil inflasi terbesar yaitu sebesar 2,51%, yang diantaranya disumbang oleh sewa rumah. Sementara itu, Kelompok volatile foods memberi kontribusi inflasi sebesar 2,43% (yoy) yang disumbang oleh kelompok bahan makanan . Sedangkan kelompok administered price memberi kontribusi inflasi sebesar 1,32% yang disumbang oleh kenaikan tarif angkutan udara, cukai rokok, tarif LPG, dan tarif Listrik.

Grafik Perbandingan Inflasi Tahun 2005–2015
Kota Balikpapan, Provinsi Kaltim, dan Nasional



Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan:

- Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD) Kota Balikpapan dalam rangka menekan Inflasi di kota Balikpapan;
- Mengintruksikan kepada Bulog untuk melakukan operasi pasar beras,

- Mengintruksi kepada Pertamina untuk melakukan operasi gas elpigi 3 kg
- Bersama Unsur Pimpinan Daerah melakukan rapat koordinasi dan melakukan sidak pasar menjelang hari-hari besar keagamaan
- Mengintruksikan kepada Dinas Pendidikan untuk siswa baru untuk Sekolah Dasar yang masuk ke sekolah menengah selama 6 bulan masih dapat menggunakan seragam SD nya begitu pula SMP ke SMA
- Menerbitkan Perwali nomor 23 tahun 2013 tentang petunjuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan kota Balikpapan yang isi antara lain
- Mengalokasikan anggaran untuk program bantuan pendidikan (seragam dan kelengkapan sekolah dan transport kepada keluarga miskin)
- Mengalokasikan anggaran subsidi siswa gakin kepada sekolah swasta
- Membuat pasar tani di halaman kantor Dinas Pertanian kelautan dan perikanan pada hari jum'at sabtu dan bulan ramadhan

3). Pendapatan perkapita

Peningkatan pendapatan menjadi salah satu penanda keberhasilan pembangunan terutama dari aspek ekonomi. Walaupun pendekatan pembangunan telah mengalami perkembangan yang lebih melihat pentingnya pengembangan kapabilitas manusia, namun aspek ekonomi yang diwakili antara lain oleh pendapatan- tetaplah menjadi bagian kunci dalam pembangunan itu sendiri.

Peningkatan pendapatan juga menggambarkan bagaimana manfaat terhadap akses pembangunan telah dirasakan oleh warga negara. Namun demikian, penting untuk diperhatikan, bahwa sebagaimana halnya banyak capaian pembangunan, peningkatan pendapatan juga bukan hanya merupakan hasil dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau negara sendiri. Peran dari pihak non negara, seperti swasta dan masyarakat adalah pilar kunci yang menyumbang pada capaian peningkatan pendapatan.

Dalam IKU Walikota Balikpapan Tahun 2015, peningkatan pendapatan ditargetkan dari Rp. 61021818. Realisasinya mencapai nilai pendapatan Rp 64433173 atau sebanyak 105,6% dari target yang dicanangkan. Ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik untuk tahun 2015. Selain itu, bila disandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini telah menyumbang sebanyak 94,97% dari target akhir RPJMD tahun 2016.

Sasaran 8 : Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial

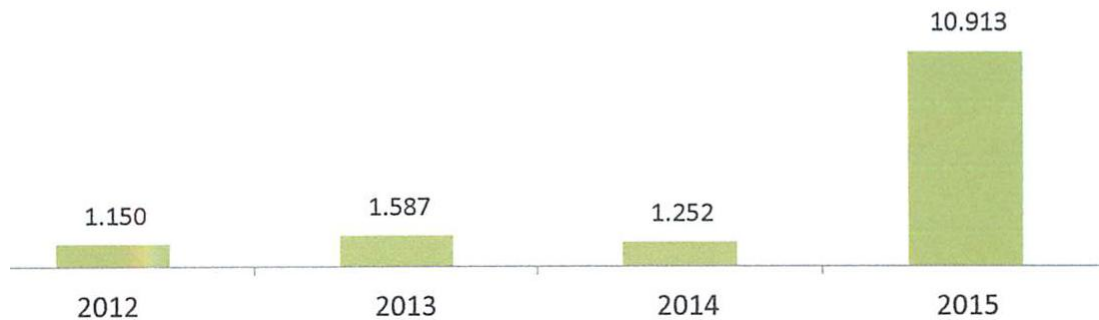
Indikator : Persentase PMKS yang menerima Bantuan Sosial

No.	Indikator Kinerja Utama	Target tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Target Akhir RPJMD	Capaian 2015 Terhadap RPJMD 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase PMKS yang menerima Bantuan Sosial	95%	78,85%	83%	100%	78.85%

Peningkatan Pelayanan dan perlindungan terhadap PMKS dalam pengukuran capaian Kinerjanya mempergunakan angka PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan social sebagai tolak ukur. Sedangkan ditingkat nasional tolak ukurnya mempergunakan jumlah penerimaan manfaat yang memiliki kemampuan dasar melakukan aktifitas harian dan jumlah penerima manfaat yang terpenuhinya kebutuhan dasar.

PMKS yang seharusnya menerima bantuan pada tahun 2015 sebanyak 13.888 orang. Target kinerja sebanyak 10.913 orang. Target tersebut dicapai melalui program pelayanan rehabilitasi dan kesejahteraan social, serta program pembinaan para penyandang cacat dan trauma.

GRAFIK 3.5.
ANGKA PMKS YANG MEMPEROLEH BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL



PMKS di Balikpapan yang mendapatkan bantuan di Balikpapan terdiri dari: Anak balita terlantar (ABT), Anak terlantar (ANTAR), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Anak jalanan (Anjal), Anak yang memerlukan perlakuan Khusus (AMPK), Lanjut usia Terlantar, Penyandang cacat, Tuna susila, Gelandangan, Pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, Orang dengan HIV/ AIDS, Korban penyalahan Narkoba, Korban Tindak kekerasan, Pekerja Migran dan Orang terlantar di perjalanan; Korban bencana alam, Korban Bencana Sosial, Wanita Rawan Sosial ekonomi, Fakir Miskin, keluarga bermasalah social Psikologis, keluarga berumah tak layak huni.

Sasaran 9 : Meningkatkan Kapasitas Penyelenggara pelayanan Publik

Indikator : Skor Survei Kepuasan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja Utama	Target tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Target Akhir RPJMD	Capaian 2015 Terhadap RPJMD 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Skor Survei Kepuasan Masyarakat	80	79.36	99.2%	85	93.36%

Capaian realisasi dari indikator Skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Tahun 2015 mencapai 99.2% dari target nilai 80. Skor survey Kepuasan masyarakat kota Balikpapan tahun 2015 berada di angka 79.36, termasuk dalam kategori Baik. Skor ini mengalami kenaikan tiap tahunnya, walaupun jumlah responden dan instansi pelayanan yang disurvei berubah di setiap tahun. Tahun 2012 sebanyak 6 unit Pelayanan, Tahun 2013 sebanyak 130 unit Pelayanan, Tahun 2014 dengan 140 unit pelayanan, dan Tahun 2015 sebanyak 250 unit pelayanan.

**Matrix Skor Survey Kepuasan Masyarakat
Tahun 2012-2015**

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015
1.	Skor Survey Kepuasan Masyarakat	73	75.71	76.73	79.36

Sumber : Bagian Organisasi Setdakot Kota Balikpapan

Survei Kepuasan Masyarakat di Kota Balikpapan dilaksanakan secara mandiri dengan membuat Tim Survei yang melibatkan pengawas sekolah, Penyuluh Keluarga Berencana, dan Staf Bagian Organisasi, serta unsur dinas Kebersihan dan Dinas Kesehatan. Pada Tahun 2015, Tim SKM melakukan Survey terhadap 250 unit pelayanan yang terdiri dari 162 sekolah, 34 Kelurahan, 28 Puskesmas, 6 Kecamatan dan 20 SKPD.

Survey dilakukan dengan menyebarkan questioner yang jenis pertanyaannya disesuaikan dengan unit yang akan disurvei. Lembar questioner diberikan kepada responden yang dipilih secara acak sederhana yang disesuaikan dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan, sehingga diharapkan hasil yang diperoleh dapat seobjektif mungkin. Untuk menghindari bias, maka pemilihan responden adalah responden yang telah mendapatkan layanan selama dalam waktu referensi survey.

**Nilai Persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM,
Mutu Pelayanan dan Kinerja unit Pelayanan**

Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 – 1.75	25 – 43.75	D	Tidak Baik
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	C	Kurang Baik
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	B	Baik
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100	A	Sangat baik

Hasil yang diharapkan dari survey kepuasan masyarakat adalah terukurnya kepuasan masyarakat untuk mengetahui pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tertatanya system, mekanisme dan prosedur pelayanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna serta tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sasaran 10 : Meningkatnya cakupan layanan persediaan daya listrik kepada masyarakat

Indikator : Rasio ketersediaan listrik

No.	Indikator Kinerja Utama	Target tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Target Akhir RPJMD	Capaian 2015 Terhadap RPJMD 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rasio ketersediaan Listrik	435.5 KW	432.35 KW	99.27%		

Kondisi pasokan listrik Kota Balikpapan pada Tahun 2015 adalah: Dari 400 megawatt yang tersedia, beban yang digunakan mencapai titik puncak sebesar 420 megawatt. ketersediaan listrik saat ini masih terbatas. Sehingga, menjadi salah satu faktor dilakukannya pemadaman. Dengan keterbatasan pasokan listrik.

Data kelistrikan
Pt.PlN (Persero) Wilayah Kaltim Area Balikpapan

No.	Uraian	Satuan	jumlah
1	Daya Listrik terpasang 2015	VA	558.065.782
	Daya Listrik terpasang saat ini	VA	562.696.082
2.	Jumlah Kebutuhan listrik 2015	kWH	1.15.240.402
	Jumlah kebutuhan listrik th.2016-2021	kWH	
3.	Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik th. 2015	Plg	257.898
	Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sampai saat ini	Plg	259.645

Sasaran 11 : Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan

Indikator : Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

No.	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Target Akhir RPJMD	Capaian 2015 Terhadap RPJMD 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB	39481688	39481688	100	**	**

PDRB memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dimana semakin tinggi PDRB maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonominya juga tinggi. untuk itu pemerintah khususnya kota Balikpapan diharapkan dapat terus menerus meningkatkan PDRB-nya khususnya sektor industri yang memiliki prospek potensial untuk dikembangkan.

Salah satu menyumbang dalam PDRB adalah sektor industri. Sektor industry merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Laju pertumbuhan sector industri positif dan kontribusinya terhadap PDRB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan .

Sasaran 12 : Terlaksananya Reformasi Birokrasi

Indikator : Opini BPK

Indeks persepsi Korupsi

No.	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Target Akhir RPJMD	Capaian 2015 Terhadap RPJMD 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Opini BPK	WTP	WTP	100%	WTP	100%
2.	Indeks Persepsi Korupsi	6.0	6.62	110.3%	6.5	101.84%

Opini BPK merupakan penilaian pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk menilai sejauh manakah penilaian yang obyektif bisa dilakukan terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan.

Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahunnya ini mencakup pemeriksaan terhadap Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan Keuangan. Opini yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat terdiri dari Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar dengan Pengecualian (WDP) dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Matrix Opini BPK dan IPK
Kota Balikpapan Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
• Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
• Indeks Persepsi Korupsi	-	-	-	5.0	6.62

Sasaran 13 : Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Indikator : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Nilai LPPD

No.	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Target Akhir RPJMD	Capaian 2015 Terhadap RPJMD 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB 3.0926	CC 3.0829	- 99.82%	BB 3.0926	- 99.82
2.	Nilai LPPD	(10 besar)	(11 Besar			

Akuntabilitas pemerintah menunjukkan pergeseran baru dalam relasi antara pemerintah dengan publik. Konsep akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan publik untuk mengelola urusanurusan publik, dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016, perhatian Pemerintah Kota Balikpapan akan pentingnya akuntabilitas, bisa dilihat dalam rumusan misi ke-5 yaitu “Meningkatkan Pelayanan Publik dan Melaksanakan Reformasi Birokrasi”.

Tata kelola pemerintahan yang baik lazim di gambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Ketiga kata kunci ini menunjukkan juga pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusan-urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah yang lain. Karenanya, partisipasi dan transparansi juga menjadi kunci selain akuntabilitas untuk membuat pengelolaan publik dengan lebih terbuka dan memberi ruang bagi berbagai pihak.

1). Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah

Berdasarkan evaluasi Kementerian PAN dan RB RI terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) yang terdiri dari 5 komponen besar yaitu (1) Perencanaan kinerja (2) Pengukuran Kinerja (3) Pelaporan kinerja(4) Evaluasi Kinerja dan (5) Capaian Kinerja, pada

tahun 2015 (LKjIP Tahun 2014) diperoleh nilai/skor rata-rata 55.19 atau dengan predikat penilaian “CC”, dari yang telah ditargetkan B. Pemerintah Kota Balikpapan bertekad akan meningkatkan kinerja melalui program peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja. Menurut penilaian Kemenpan dan Reformasi Birokrasi, beberapa hal penting dari penilaian akuntabilitas pemerintah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kota Balikpapan beserta unit kerja telah menyusun dokumen perencanaan berupa RPJMD, Renstra tingkat SKPD, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja. Hal yang perlu diperhatikan baik ditingkat kabupaten maupun SKPD adalah kualitas perencanaan, dimana tujuan dan sasaran yang ditetapkan belum sepenuhnya dilengkapi dengan indikator kinerja yang berorientasi hasil, relevan dan terukur;
- b. Perjanjian Kinerja dibuat walaupun baru sampai level SKPD, dan belum sepenuhnya selaras dengan Perjanjian Kinerja di Level Kota, hal tersebut disebabkan karena masih banyak sasaran dan indikator yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja baik di level kota maupun SKPD masih belum berorientasi hasil;
- c. Pemerintah Kota Balikpapan telah menyusun secara formal Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan pemerintah dan SKPD di lingkungan kota Balikpapan, namun IKU yang digunakan masih belum sepenuhnya berorientasi hasil dan belum cukup untuk mengukur keberhasilan atas pencapaian tujuan/ sasaran strategis, khususnya ditingkat SKPD;
- d. Laporan Kinerja telah disusun sampai ke level SKPD, namun masih banyak mengungkapkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, bukan pada capaian kinerjanya. Mekanisme pengumpulan data kinerja dalam rangka pelaporannya belum dapat diandalkan;
- e. Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja melalui inspektorat. Hasil evaluasi secara internal ini masih memerlukan penyempurnaan terkait dengan simpulan hasil yang belum sepenuhnya menggambarkan kondisi penerapan SAKIP di SKPD. Evaluasi atas program baru sebatas pelaksanaan program dan penyerapan anggarannya, belum kepada hasil program.

Upaya yang dilakukan :

1. Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan Reviu dan Penyempurnaan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) . Indikator Kinerja Utama yang awalnya memiliki 46 Sasaran Strategis dan 182 Indikator kinerja Utama telah direvisi menjadi 16 sasaran strategis dan 24 IKU. Hal ini dilakukan dengan mengkaji ulang Sasaran Strategis dan indikator yang dianggap kurang relevan, kurang spesifik, tidak terukur dan masih jauh dari kata cukup.
2. Perjanjian Kinerja (PK) yang semula hanya dibuat pada level Eselon saja, saat ini telah dibuat hingga ke level Esselon III dan IV. Hal ini dimaksudkan agar SKPD terkait memahami tugas dan fungsinya hingga sampai ke level pelaksana kegiatan.

2). Nilai LPPD

LPPD bertujuan untuk memberikan gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Sebagai sarana laporan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka paling tidak ada 3 (tiga) substansi pokok capaian kinerja disajikan, yaitu: (1) capaian kinerja penyelenggaraan tugas desentralisasi yang diukur dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK), (2) capaian kinerja penyelenggaraan tugas pembantuan, dan (3) capaian kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Kota Balikpapan meraih posisi 11 besar Nasional dalam pelaporan LPPD tahun 2015 dengan jumlah nilai 3.0829. capaian ini merupakan sebuah keberhasilan tersendiri bagi pemerintah kota Balikpapan dalam menyajikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Dibanding tahun sebelumnya kota Balikpapan hanya berada di peringkat 1 Tk. Provinsi tanpa masuk peringkat Nasional. Dari hasil ini dapat dikatakan capaian kinerja kota Balikpapan terhadap indikator “nilai LPPD” menunjukkan hasil yang positif.

Sasaran 14 : Terwujudnya Infrastruktur Dasar

Indikator : Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik

No.	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Target Akhir RPJMD	Capaian 2015 Terhadap RPJMD 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik	80%	100%	125%	100%	100%

Panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2015 di Kota Balikpapan telah mencapai angka 100% , hal ini melebihi target yang ditetapkan pada dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yaitu sebesar 80%. Dan Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD capaian yang dicapai pada tahun 2015 masih melebihi target yang ditetapkan.

Sasaran 15 : Meningkatnya kemampuan Perempuan dalam keluarga

Indikator : Indeks Pembangunan Gender (IPG)

No.	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Target Akhir RPJMD	Capaian 2015 Terhadap RPJMD 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88	90.05**	102.32%	90	100.05

***Angka sementara*

Berdasarkan data BPS tahun 2015 Indeks Pengarusutamaan Gender (IPG) Kota Balikpapan berada di angka 90,05. Angka ini tiap tahun sejak tahun 2011 mengalami kenaikan hingga tahun 2014.

Indeks Pengarusutamaan gender Kota Balikpapan
Tahun 2011- 2014

No	Keterangan	2011	2012	2013	2014
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86.22	86.72	87.14	90.05

Sumber: BPS Kota Balikpapan

Sampai saat ini, keberhasilan peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan di Indonesia umumnya diukur melalui dua standar pengukuran yang dikembangkan oleh UNDP, yaitu Indeks Pembangunan Gender/IPG (Gender-related Development Index) dan Indeks Pemberdayaan Gender/ IDG (Gender Empowerment Measurement), yang kemudian sejak 2010 disempurnakan menjadi Indeks Ketidaksetaraan Gender/IKG (Gender Inequality Index). IKG mengkombinasikan elemen dari IPG dan IDG dan menawarkan perbaikan metodologi dan alternatif indikator untuk mengukur ketidaksetaraan gender dalam tiga dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pencapaian pendidikan dan Keterwakilan dalam jabatan publik.

a. Kesehatan Reproduksi

Aspek kesehatan reproduksi diukur dari angka kematian Ibu ,alasannya adalah karena keselamatan ibu (*safe motherhood*) mencerminkan pentingnya perhatian masyarakat (terutama para suami) dan negara terhadap peran reproduktif perempuan. Dengan demikian, isu kesehatan reproduksi adalah isu gender yang timbul akibat adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender, yaitu adanya diskriminasi dan kegagalan pemerintah dan masyarakat dalam pemenuhan hak-hak seksual dan reproduksi perempuan. Jumlah Angka Kematian Ibu di Kota Balikpapan tahun 2015 berjumlah 9 Kasus. Jumlah kasus ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu berjumlah 14 kasus. Penyebab kematian tertinggi adalah penyebab langsung yaitu eklampsia dan perdarahan

b. Pencapaian pendidikan

Dalam aspek ini, kesetaraan dan keadilan gender diukur melalui proporsi penduduk perempuan dan laki-laki usia 25 tahun pendidikan minimal tamat SLTP dan rata-rata lama bersekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Angka kelulusan Kota Balikpapan tahun 2015

untuk tingkat sltp adalah 100%, dihitung dari jumlah siswa yang mengikuti ujian dibagi jumlah seluruh siswa tingkat akhir di SLTP.

c. Keterwakilan dalam jabatan Publik

Dalam aspek ini, kesetaraan dan keadilan gender diukur dengan melihat persentase keterwakilan perempuan dibanding laki-laki di dalam lembaga legislative dan eksekutif hal ini dikarenakan akses dan peluang perempuan dalam kedua lembaga tersebut juga masih sangat lemah/kecil, terutama untuk mencapai posisi pengambil keputusan. di Kota Balikpapan jumlah pejabat Wanita di lembaga legislative dan eksekutif sudah menunjukkan angka yang positif. Di lembaga eksekutif, dari 20 Kepala Dinas dan Badan (Eselon II) pejabat Wanita Hanya sebanyak 9 orang atau sekitar 45%. Sedangkan dilembaga legislative Jumlah Anggota dewan Perempuan adalah 8 orang dari 45 Anggota dewan atau sebanyak 17% dari jumlah Anggota dewan Laki- laki.

Sasaran 16 : Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup

Indikator : Skor survey Kepuasan masyarakat terhadap kebersihan dan keindahan Kota

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Target Akhir RPJMD	Capaian 2015 Terhadap RPJMD 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Skor survey Kepuasan masyarakat terhadap kebersihan dan keindahan Kota	80	84.2	105.25%	85	99.05%
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63.38	63.38	100%	63.95	99.10%

1). Skor SKM terhadap kebersihan dan keindahan kota

Kebersihan dan Keindahan Kota Balikpapan merupakan program utama dalam rangka memenuhi visi walikota untuk mewujudkan Kota Balikpapan yang nyaman dihuni. Survey Kepuasan Masyarakat terhadap kebersihan dan keindahan Kota dilakukan selain sebagai wadah masyarakat untuk menyampaikan dan menyalurkan keluhan pelayanan, survey ini juga

dimaksudkan untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah Daerah.

Nilai Per Unsur Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	Jumlah Nilai	Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan	NILAI IKM
1	Kinerja DKPP dalam mengelola TPS	2100	3.488	84.20
2	Ketepatan waktu pengangkutan sampah	2042	3.398	
3	Kinerja petugas pengangkut sampah	2014	3.357	
4	Kinerja DKPP dalam mengelola kebersihan trotoar, media dan jalan protokol	2075	3.453	
5	Kinerja DKPP dalam mengelola taman di sepanjang media jalan	2113	3.516	
6	Tingkat pemerataan jangkauan dalam melaksanakan pelaksanaan pelayanan	1974	3.285	
7	Tingkat keindahan dan kenyamanan taman	2061	3.435	
8	Tingkat kebersihan kota	2043	3.416	
9	Tingkat kenyamanan kota	2069	3.448	
10	Tingkat kewajaran biaya retribusi sampah dibanding dengan hasil pelayanan kebersihan / persampahan	1922	3.203	
11	Tingkat kejelasan rincian biaya retribusi persampahan	1877	3.149	
12	Tingkat kesopanan dan keramahan petugas pelayanan retribusi persampahan	1948	3.268	

Sumber: Bagian Organisasi Setdakot Balikpapan

Hasil survey di Tahun 2015 menunjukkan nilai yang sangat baik. Hasil penilaian 84.2 masuk kedalam kriteria sangat baik(A). Survey dilakukan dengan menyebarkan questioner kepada responden secara acak kepada masyarakat Kota Balikpapan. Questioner yang diberikan terdiri dari 12 unsur pertanyaan yang mewakili pelayanan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan.

Unsur pelayanan yang menonjol adalah Kinerja DKPP dalam Mengelola taman di sepanjang median jalan yang mendapatkan jumlah nilai 2113, yang artinya rata- rata nilai yang diberikan tiap responden adalah 3,516. dengan adanya survey ini diharapkan kedepannya Kota Balikpapan dapat terus berbenah dan menjadi lebih baik.

2). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Untuk mengukur kualitas lingkungan umumnya dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk menilai apakah kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau sebaliknya. Salah satu cara untuk mereduksi banyak data dan informasi adalah dengan menggunakan indeks.

Indeks kualitas lingkungan dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan program-program pengelolaan lingkungan. Selain sebagai sarana untuk mengevaluasi efektivitas program-program pengelolaan lingkungan, indeks kualitas lingkungan mempunyai peranan dalam hal:

1. Membantu perumusan kebijakan
2. Membantu dalam mendisain program lingkungan
3. Mempermudah komunikasi dengan publik sehubungan dengan kondisi lingkungan

Kota Balikpapan sejak tahun 2014 telah mulai menghitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) kota Balikpapan dan membuat proyeksi hingga tahun 2021. Berikut data ditampilkan melalui table dibawah.

Data IKLH Kota Balikpapan

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IPA	12.09	12.24	12.39	12.54	12.69	12.84	12.99
IPU	27.24	27.39	27.54	27.69	27.84	27.99	28.14
ITH	24.05	24.32	24.60	24.87	25.14	25.41	25.68
IKLH	63.38	63.95	64.53	65.10	65.67	66.24	66.81

Rumus Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

$$\text{Provinsi/Kabupaten} = (\text{IPA} \times 30\%) + (\text{IPU} \times 30\%) + (\text{ITH} \times 40\%)$$

Keterangan : IPA = indeks pencemaran air

IPU = indeks pencemaran udara

ITH = indeks tutupan hutan

PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Ikhtisar laporan realisasi anggaran APBD Kota Balikpapan pada tahun 2015 (setelah perubahan) yang merupakan akuntabilitas keuangan dapat digambarkan sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
Pendapatan Daerah	2.529.001.945.784,00	2.233.750.843.885,84	88.33
Belanja	3.431.637.949.914,80	2.907.590.320.776,65	84.73
Pembiayaan	935.696.004.130,80	935.696.004.130,80	100
Penerimaan			
Pembiayaan	33.060.000.000,00	30.180.000.000,00	91.29
Pengeluaran			

- Pendapatan Daerah**

Pendapatan Asli Daerah

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
Hasil Pajak Daerah	353.408.000.000,00	385.492.888.753,31	109.08
Hasil Retribusi Daerah	54.013.679.440,00	51.920.176.572,63	96.12
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	28.560.000.000,00	25.716.622.557,00	96.12
Lain-lain PAD Yang SaH	103.910.676.650,00	119.615.177.258,25	115.11

Realisasi perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan selama periode tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

TAHUN	TARGET PAD	REALISASI PAD	PENDAPATAN
2011	200.000.000.000,00	237.029.073.666,77	1.804.343.010.488,77
2012	290.007.283.203,00	352.034.256.557,17	1.647.132.469.666,19
2013	354.840.272.692,00	470.465.949.932,97	2.214.991.437.841,00
2014	638.630.681.123,00	729.037.647.063,32	2.474.995.562.245,32
2015	539.892.356.090,00	582.744.865.141,84	2.529.001.945.784,00

- Dana Perimbangan

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.030.844.276.069,00	747.602.272.119,00	72.52%
Dana Alokasi Umum	388.230.396.000,00	388.230.396.000,00	100%
Dana Alokasi Khusus	11.835.470.000,00	9.468.375.000,00	80%

Realisasi perkembangan dana perimbangan Kota Balikpapan selama periode tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

TAHUN	PERIMBANGAN	R(%)	PENDAPATAN	PROPORSI TERHADAP PENDAPATAN
2011	1.151.703.793.532,-	112.81%	1.804.343.010.488,77	63.8%
2012	1.074.521.018.050,00	124.6%	1.647.132.469.666,19	134.0%
2013	1.173.881.648.321,00	109.2%	2.214.991.437.841,00	109.3%
2014	2.635.068.224.864,00		2.474.995.562.245,32	
2015	1.430.910.142.069,00	80.04%	2.233.750.843.885,84	88.33%

- Lain-lain Pendapatan Yang Sah

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	252.545.976.625,00	222.438.963.625,00	88.08
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	146.023.971.000,00	146.023.971.000,00	100
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	155.129.500.000	136.057.000.000,00	87.71

- Belanja

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
Belanja Tidak Langsung	1.078.027.912.885,80	990.651.523.663,37	91.89
Belanja Langsung	2.353.610.037.029,00	1.916.938.797.113,18	81.45

Realisasi perkembangan Belanja Kota Balikpapan selama periode tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

TAHUN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	(%)	BELANJA LANGSUNG	(%)
2011	665.975.045.902,92	90.7	861.457.202.954,85	80
2012	636.400.738.757,38	95.4	1.035.447.137.559,59	89.5
2013	734.517.519.834,65	88.4	1.686.329.924.246,29	72.2
2014	783.390.898.940,53	91.6	1.716.199.878.941,62	74.1
2015	990.651.523.663,37	91.89	1.916.938.797.113,18	81.45

Proporsi antara belanja tidak langsung dan belanja langsung adalah 51.67%, sehingga proporsi belanja pemerintah kota Balikpapan masih cukup baik, hal ini terlihat dari proporsi Belanja Langsung/ Belanja publik persentasenya masih lebih besar.

CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Dalam kurun waktu tahun 2015 Pemerintah Kota Balikpapan telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang diraih yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih adalah sebagai berikut:

No	Nama Penghargaan	Tingkat	Lembaga yang Memberikan	Keterangan
1	Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik UU 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	Nas	Ombudsman Republik Indonesia	
2	Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik UU 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	Nas	Ombudsman Republik Indonesia	
3	Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik UU 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	Nas	Ombudsman Republik Indonesia	
4	Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik UU 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	Nas	Ombudsman Republik Indonesia	
5	Piagam Penghargaan Terbaik I	Prov	Komisi Informasi Kalimantan Timur	Diberikan kepada Pemkot Balikpapan sebagai Badan Publik Pemerintah Kab/Kota dalam Keterbukaan Informasi Publik
6	Penghargaan We Love City	Internasional	WWF	
7	PERPAMSI Award 2015	Nas	Persatuan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi)	Diberikan kepada Pemkot Balikpapan yang telah memberikan pelayanan terbaik air minum dan sanitasi kategori 50.000-100.000 pelanggan PDAM Wilayah III Kalimantan dan Sulawesi
8	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Prov	PLH kepala BPK Perwakilan Kaltim	

9	Status Lingkungan Hidup Daerah	Nas	Kementerian Lingkungan Hidup	
10	Status Lingkungan Hidup Daerah Ekoregion Kalimantan	Nas	Kementerian Lingkungan Hidup	
11	Indonesia Attractiveness	Nas	Tempo Group dan Frontier	
12		Nas	Kementerian Koperasi dan UKM	Diberikan pada Hari Koperasi di Kupang, NTT
13	Pakarti Utama III Tingkat Nasional Pemenang Terbaik Posyandu Tingkat Nasional Kategori Kota Tahun 2015	Nas	PKK Pusat/Kementerian Dalam Negeri	Diberikan pada Posyandu Sumber Asih Kel. Sumber Rejo pada acara Harganas tahun 2015
14	Kota Layak Anak Kategori Pratama	Nas	Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak	Diberikan kepada Pemerintah Kota Balikpapan
15	Peringkat II Anugerah Kota Cerdas 2015 Kategori Kota Berpenduduk di atas 200 ribu sampai 1 juta	Nas	Kompas & ITB	
16	Peringkat I Kategori Kota PKPD-PU Bidang Tata Ruang	Nas	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	diberikan kepada Kota Balikpapan
17	Adipura Kencana	Nas	Kementrian Kehutanan dan LH	diberikan kepada Kota Balikpapan, utk Kategori Kota besar (penduduk lebih dari 500 ribu jiwa)
18	Juara TOGA	Nas	Kementerian Kesehatan	diberikan kepada Posyandu Kel. Manggar
19	WTN Paripurna	Nas	Kementerian Perhubungan	Diberikan kepada Kota Balikpapan (WTN Paripurna karena menang utk 2 kategori sekaligus yaitu angkutan dan lalin)
20	Juara III Budaya Mutu Sekolah	Nas		Diberikan kepada SD Kemala Bhayangkari untuk kategori Mutu Sekolah Secara Keseluruhan
21	Juara III Budaya Mutu Perpustakaan	Nas		Diberikan kepada SD 003 Balikpapan
22	Penghargaan Indonesia Road Safety Award	Nas	Lembaga Swasta bekerjasama dengan Kemenhub	Diberikan kepada Kota Balikpapan untuk kategori Road Safety Management

				2015. diserahkan oleh Menhub
23	Kota Peduli HAM	Nas	Kemenkum & HAM	
24	Regional Marketing Award	Nas	DPD RI, Kemendagri, Markplus	Diberikan kepada Pemerintah Kota Balikpapan (As The Gold Champion In Municipality Category)
25	Terbaik I Bidang Pariwisata Kategori Kota	Prov		
26	Terbaik I Bidang Kepemudaan	Prov		
27	Terbaik I Bidang Kebudayaan	Prov		
28	Terbaik I Bidang Pendidikan	Prov		
29	Terbaik III Bidang Bunda PAUD Kategori Penuntasan Satu Desa Satu PAUD	Prov		
30	Terbaik Bidang Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kategori Kota	Prov		
31	Terbaik I Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Prov		
32	Terbaik I Tim Penggerak PKK berprestasi	Prov		
33	Terbaik II pengelola bina keluarga balita (BKB) Tahun 2014	Prov		

34	Penghargaan Badan Lingkungan Hidup	Prov		
35	Terbaik I Bidang Kependudukan	Prov		
36	Terbaik I Bidang Penyelenggaraan Tata Ruang	Prov		
37	Terbaik I Bidang Wahana tata Nugraha	Prov		
38	Terbaik I Bidang Kesehatan	Prov		
39	Terbaik I Bidang Pembangunan Hukum dan Ham	Prov		
40	Terbaik I Bidang Keterbukaan Informasi Publik	Prov		
41	Terbaik I Bidang Perekonomian	Prov		
42	Terbaik I Bidang Pembangunan Perpustakaan dan Minat Baca	Prov		
43	Terbaik II Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Prov		
44	Terbaik II Bidang Daya Saing Daerah	Prov		
45	Terbaik II Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	Prov		
46	Terbaik II Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Prov		
47	Terbaik II Bidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Prov		
48	Terbaik II Bidang Peningkatan E-Government	Prov		
49	Terbaik III Bidang Kelautan dan Perikanan	Prov		

BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Balikpapan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2015 terdapat 16 (enam belas) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) indikator kinerja utama.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 20 indikator sasaran, disimpulkan bahwa :

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA
1	2	3
1	Meningkatnya kualitas/ mutu pendidikan	Tercapai
2	Meningkatnya lapangan usaha dan lapangan kerja	Tercapai
3	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Tercapai

4	Mewujudkan kondusifitas di daerah dengan mensinergikan peran-peran masyarakat dan pemerintahan dalam pembangunan	Tercapai
5	Meningkatnya pertanian dalam arti luas	Tercapai
6.	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tercapai
7.	Meningkatnya kekuatan perekonomian pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat	Tercapai
8.	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	Tercapai
9.	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik	Tercapai
10.	Meningkatnya cakupan layanan persediaan daya listrik kepada masyarakat	Tercapai
11	Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan	Tercapai
12.	Terlaksananya reformasi birokrasi	Tercapai
13.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Tercapai
14	Terwujudnya infrastruktur dasar	Tercapai
15.	Meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga dan pembangunan	Tercapai
16.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Tercapai

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 16 sasaran beserta indikatornya, pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Kota Balikpapan menunjukkan trend meningkat dibandingkan pada tahun 2014 yang merupakan tahun ketiga RPJMD.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 khususnya untuk Tahun Anggaran 2015 menunjukkan kategori baik, akan tetapi terdapat beberapa indikator kinerja yang masih perlu perhatian serius Pemerintah Kota Balikpapan untuk ditingkatkan, yakni :

1. Persentase PMKS yang menerima bantuan social;
2. Tingkat Pengangguran;
3. Indeks Kemiskinan Manusia;
4. Pertumbuhan Ekonomi;
5. Skor survey kepuasan masyarakat;
6. Rasio ketersediaan daya listrik.

Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik khususnya yang berkaitan secara langsung dengan beberapa indikator diatas. Akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan dapat menjadi tolok ukur dan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kinerja Pemerintah Kota Balikpapan.

WALIKOTA BALIKPAPAN

H.M. RIZAL EFFENDI

Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2015			Target Akhir Rpjmd	Capaian 2015 Terhadap RPJMD 2016
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya kualitas/mutu pendidikan	1. Angka Melek Huruf	98.84	98.86	100.02	98.49	81.19%
		2. Rata - Rata Lama Sekolah	10.39	10.41	102.35	10.20	102.05%
2	Meningkatnya lapangan usaha dan lapangan kerja	1. Tingkat pengangguran	7.90%	8.17%	9616.00%	5.2%	63.64%
3	Meningkatnya Status kesehatan masyarakat	1. Usia Harapan Hidup	72.26	73.94	102.32	72.3	102.26%
4	Mewujudkan kondusifitas di daerah dengan mensinergikan peran-peran masyarakat dan pemerintahan dalam pembangunan	1. Penurunan Konflik	0	0	100%	0	100%
5	Meningkatnya pertanian dalam arti luas	1. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	428M	669M	156	550M	121%
6	Menurunnya tingkat kemiskinan	1. Indeks kemiskinan Manusia	2.50%	2.35%	94%		
7	Meningkatnya kekuatan perekonomian pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat	1. Pendapatan Perkapita	61,021,818.00	64,433,173.00	105.60%	67,844,528.00	94.97%
		2. PAD	539.892.356.090	582.744.865.141	107.94%	593,881,591,699	98.12%
		3. Pertumbuhan ekonomi	4.60%	3.98%	86.53%	7.92%	50.25%
		3. Inflasi	7.38%	6.26%	159,74%	7.46%	119%
8	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1. Presentase PMKS yang Menerima Bantuan Sosial	95%	78.80%	83%	100%	78.85%

9	Meningkatnya Kapasitas penyelenggara pelayanan publik	1 Skor Survei Kepuasan Masyarakat	80	79.36	99.2%	85	93.36
10	Meningkatnya cakupan layanan persediaan daya listrik kepada masyarakat	1 Rasio Ketersediaan daya listrik	435.5	432.35	99.27	**	**
11	Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan	1 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	39481688	39481688	100%	**	**
12	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	1 Opini BPK	WTP	WTP	100%	WTP	100%
		2 Indeks Persepsi Korupsi	6	6.62	110.30%	6.5	101.84%
13	Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	1 Nilai akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintahan	BB	CC	80%	BB	80%
		2 Nilai LPPD	3.0926	3.0829	99.82	**	**
14	Terwujudnya Infrastruktur Dasar	1 Presentase panjang jalan dalam kondisi baik	80%	100%	125%	100%	100%
15	Meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga	1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88	90.05	102.32%	90	100.05
16	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	1 Indeks kualitas lingkungan Hidup	63.38	63.38	100%	63.95	99.10%
		2. Skor Survei Kepuasan masyarakat terhadap kebersihan dan Keindahan kota	80	84.2	105.25%	85	99.05%

Balikpapan, Februari 2016
WALIKOTA BALIKPAPAN

M. RIZAL EFFENDI

